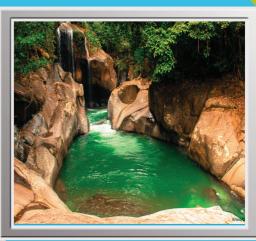


Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah

2016







KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi robbil'alamin. Marilah kita haturkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016.

Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan

dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini juga memuat aspek keuangan yang berisi target dan realisasi dalam membelanjakan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini dapat menjadi salah satu gambaran dan rujukan untuk lebih meningkatkan kinerja masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari segi aspek perencanaan hingga realisasi pada RPJMD yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membuka tangan menerima kritik dan saran guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kabupaten Padang Pariaman, Maret 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN

ALI MUKHNI

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIP ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebanyak 15 (lima belas) sasaran strategis yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 16 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator dikategorikan sangat berhasil, 9 (sembilan) indikator dikategorikan berhasil, 1 (satu) indikator dikategorikan cukup berhasil dan 1 (satu) indikator dikategorikan kurang berhasil. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan kurang berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Matrik	viii
Daftar Grafik	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
1. Kondisi Geografis	3
2. Kondisi Demografis	4
B. Struktur Organisasi	4
C. Isu Strategis dan	
Permasalahan	
Pembangunan	5
1. Isu Strategis	5
2. Permasalahan	
Pembangunan	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Visi dan Misi	12
1. Visi	12
2. Misi	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun	
2016	14
BAB III AKUNTABILITAS	
KINERJA	17
A. Pengukuran Kinerja	18
B. Capaian Indikator Kinerja	
Utama	19
C. Evaluasi dan Analisis	
Capaian Kinerja	22
D. Realisasi Keuangan	83
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Rencana Perbaikan	86
Kedepan	
Lampiran	

Daftar Lampiran

- 1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Padang Pariaman
- 2. Perjanjian Kinerja Padang Pariaman Tahun 2016
- 3. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2016
- 4. Rekapitulasi Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016
- 5. Pernyataan Telah di Review Atas Laporan Kinerja Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016 oleh Inspektur Kab. Padang Pariaman

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman mengacu ke RPJMD 2010-2015	 14
Tabel 2.2	:	Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman mengacu ke	 16
Tabel 3.1	:	RPJMD 2016-2021 Pengukuran dengan skala ordinal	 18
Tabel 3.2	:	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016	 20
Tabel 3.3	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1	 22
Tabel 3.4	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 2	 25
Tabel 3.5	•	Produktifitas Komoditi Pangan	 26
Tabel 3.6		Capaian Indikator Kinerja	 30
14501 0.0	•	Utama pada Sasaran 3	00
Tabel 3.7	:	Sektor yang mempengaruhi PDRB	 31
Tabel 3.8	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 4	 38
Tabel 3.9	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 5	 40
Tabel 3.10	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 6	 43
Tabel 3.11	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 7	 47
Tabel 3.12	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 8	 54
Tabel 3.13	:	Data Pemanfaatan lahan di Kabupaten Padang Pariaman	 54
Tabel 3.14	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 9	 57
Tabel 3.15	:	Proporsi dan kondisi jaringan jalan di Padang Pariaman	 57
Tabel 3.16	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 10	 61
Tabel 3.17	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 11	 66
Tabel 3.18	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 12	 68
Tabel 3.19	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 13	 72
Tabel 3.20	:	Skor Hasil Opini WTP	 73
Tabel 3.21	:	Opini BPK terhadap LKPD	 74
		Kabupaten Padang Pariaman	
Tabel 3.22	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 14	 76
Tabel 3.23	:	Sampel Unit Pelayanan yang ada di Padang Pariaman	 77
Tabel 3.24	:	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 15	 79
Tabel 3.25	:	Pencapaian kinerja dan anggaran	 84

Daftar Gambar

Gambar 1.1	:	Peta Kabupaten Padang Pariaman	 2
Gambar 3.1	:	Pembinaan dan Sosialisasi Majelis Taklim	 23
Gambar 3.2	:	Panen Raya Padi	 26
Gambar 3.3	:	Panen Jagung	 26
Gambar 3.4	:	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	 27
Gambar 3.5	:	Pembangunan Jaringan Tersier	 27
Gambar 3.6	:	Pembangunan Dam Parit	 26
Gambar 3.7	:	Penyerahan <i>Handtraktor</i> kepada Kelompok Tani	 27
Gambar 3.8	:	Armada Brigade Tanam	 27
Gambar 3.9	:	Teknik Penanaman Padi Pola Tanam Jajar Legowo	 28
Gambar 3.10	:	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemberantasan Hama Tikus	 28
Gambar 3.11	:	Bandara Internasional Minangkabau (BIM)	 35
Gambar 3.12	:	Pembangunan Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)	 35
Gambar 3.13	:	Pembangunan MAN Insan Cendikia	 36
Gambar 3.14	:	Jembatan Batang Anai	 36
Gambar 3.15	:	Perusahaan yang berinvestasi di Padang Pariaman	 38
Gambar 3.16	:	Jenjang Pendidikan sebagai syarat wajib	 40
Gambar 3.17	:	Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf	 41
Gambar 3.18	:	Launching Program Padang Pariaman Sehat	 44
Gambar 3.19	:	Puskesmas Batu Basa IV Koto Aur Malintang	 45
Gambar 3.20	:	Tenaga Kesehatan Puskesmas Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	 45
Gambar 3.21	:	Kantor Badan Amil Zakat Nasional Daerah Padang Pariaman	 46
Gambar 3.22	:	Bupati Padang Pariaman menerima penghargaan Swasti Saba Padap	 46
Gambar 3.23	:	Pemandu Wisata Lubuk Nyarai	 48
Gambar 3.24	:	Wisata Religius Basafa	 48
Gambar 3.25	:	Promosi wisata melalui situs resmi Padang Pariaman	 49
Gambar 3.26	:	Promosi wisata melalui brosur	 50
Gambar 3.27	:	Titik Start Tour The Singkarak di Pantai Tiram	 50
Gambar 3.28	:	Cik Ajo dan Cik Uniang Tahun 2016	 51

Gambar 3.29	:	Pengukuhan dan pelantikan Kelompok Sadar Wista	 52
		(Pokdarwis) Lubuak Bonta	
		Kapalo Hilalang Kec. 2x11	
Gambar 3.30		Kayu Tanam Destinasi Wisata Andalan	52
Gailluai 5.50	•	Padang Pariaman	 32
Gambar 3.31		Promosi festival wisata Pasie	 53
Gambar 0.01	•	Maelo	 00
Gambar 3.32		Penanaman Pohon Bupati	 55
Gambar 0.02	•	bersama Gubernur dan	00
		Menteri Lingkungan Hidup	
Gambar 3.33	:	Taman Adiwiyata di SMAN 1	 56
		Lubuk Alung	
Gambar 3.34	:	Pembangunan jalan di Padang	 58
		Pariaman	
Gambar 3.35	:	Pembangunan jembatan di	 58
		Padang Pariaman	
Gambar 3.36	:	Rehabilitasi/Pemeliharaan	 59
		jalan di Padang Pariaman	
Gambar 3.37	:	Pembangunan jalan di	 59
		pedesaan	
Gambar 3.38	:	Penyerahan bantuan sapi ke	 62
		Kelompok Usaha Bersama	
0 1 2 20		(KUBE)	60
Gambar 3.39	:	Pemberian bantuan uang	 63
		tunai kepada Rumah Tangga	
Gambar 3.40		Sangat Miskin	63
Gailluai 3.40	:	Renovasi rumah tidak layak huni	 03
Gambar 3.41		Penyaluran beras untuk	 63
Gambar 6.11	•	keluarga miskin	00
Gambar 3.42	:	Pemberian bantuan sembako	 64
	•	kepada kaum lanjut usia	
Gambar 3.43	:	Pemberian bantuan kepada	 64
		keluarga miskin	
Gambar 3.44	:	Pelatihan manajemen Karang	 64
		Taruna untuk peningkatan	
		kualitas SDM	
Gambar 3.45	:	Pemberian kepada	 65
		penyandang cacat	
Gambar 3.46	:	Pelatihan keterampilan bagi	 66
		calon tenaga kerja	
Gambar 3.47	:	Pengadaan peralatan	 64
0 1 0 40		pelatihan mesin jahit	60
Gambar 3.48	:	Penyerahan hasil LAKIP di	 69
Camban 2.40		Bandung	71
Gambar 3.49	:	Pendampingan penyusunan LAKIP	 71
Gambar 3.50	:	Coaching Clinic penyusunan	 71
Gaillbai 5.50	•	LAKIP	 , 1
Gambar 3.51	:	Pendampingan penyusunan	 71
Gambar 0.01	•	LAKIP oleh Tim Inspektorat	
		Kabupaten Padang Pariaman	
Gambar 3.52	•	Penyerahan penghargaan WTP	 73
Gambar 3.53	•	Survey IKM oleh PSKP	76
Gambar 3.54	:	Survey IKM oleh PSKP	77
Gambar 3.55	:	Kesiapsiagaan Satuan Tugas	80
	•	di BPBD	 _ 3
Gambar 3.56	:	Posko Tim Reaksi Cepat dan	 80
		UPT Damkar Wilayah II di	
		Lubuk Alung	
Gambar 3.57	:	Kendaraan Rescue dan	 81

		Damkar yang dimiliki BPBD	
		Padang Pariaman	
Gambar 3.58	:	Tower Repeater dan alat	 81
		komunikasi yang dimiliki	
		BPBD Padang Pariaman	
Gambar 3.59	:	Pelatihan Tim Reaksi Cepat	 81
		BPBD Padang Pariaman	
Gambar 3.60	:	BPBD Padang Pariaman	 82
		menerima penghargaan	
		pengabdian Insan	
		Kemanusiaan atau Dharma	
		Widya Argya	
Gambar 3.61	:	Pengadaan kendaraan	 82
		Damkar serta Baju Tahan	
		Panas dan Sepatu Safety	

DAFTAR MATRIK

Matrik 4.1	:	Masalah	dan	 88
		strateginya		

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	:	Angka rata-rata lama	41
		sekolah menurut	
		Kab/Kota di Sumatera	
		Barat Tahun 2015	
Grafik 3.2	:	Perbandingan angka	42
		melek huruf antara	
		provinsi Sumatera Barat	
		dengan Kabupaten	
		Padang Pariaman	
		Tahun 2014 s/d 2016	



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM



Pendahuluan berisi:

- A. Gambaran Umum
- B. Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis dan
 Permasalahan
 Pembangunan
- D. Sistematika Pelaporan

aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat Umum), maka penyusunan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu: 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal) hal ini bermakna bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) atas capaian kinerja selama periode tahun 2016. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan. 2) Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal) hal ini



bermakna bahwa LAKIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan

Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°11'-0°49' Lintang 98°36' Selatan dan 100°28' Buiur Timur. Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103



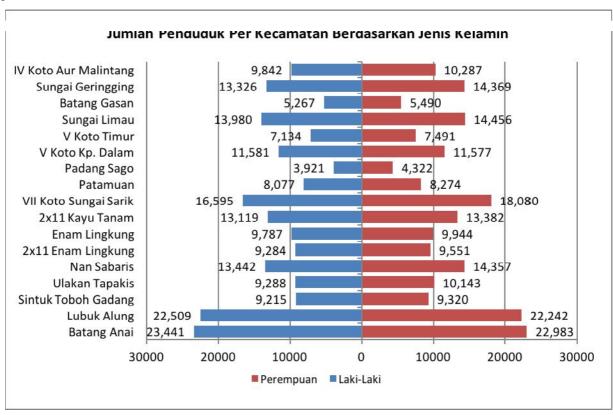
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Padang Pariaman

Nagari. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Agam, sebelah Selatan dengan Kota Padang, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, dan sebelah Barat dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.



Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 terdapat sebanyak 406.076 jiwa, yang terdiri dari 199.808 laki – laki dan 206.268 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 403.530 jiwa (198.315 laki-laki dan 205.215 perempuan). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2016 terhitung sebanyak 306 jiwa/Km². Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 46.424 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago yakni 8.243 jiwa.



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman dalam Angka 2016



B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14, dan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 5 Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah dipimpin Oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 11 Bagian, 11 Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 Badan dan 3 Kantor, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 Satuan Pol-PP, 1 BPBD, 1 Rumah Sakit Type C serta 17 Kecamatan.

BUPATI DPRD WAKIL BUPATI SEKDA ASISTEN ADM. PEREK. PEMB. DAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ASISTEN ADM. PEMERINTAHAN KESRA MEMBAWAHI MEMBAWAHI MEMBAWAHI BAGIAN ORGANISASI & PAN BAGIAN EKONOMI & BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN UMUM & PEMBANGUNAN PROTOKOLER BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN 2 BAGIAN KEUANGAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT NAGARI BAGIAN PNGELOLAAN DATA BAGIAN PERTANAHAN ELEKTRONIK BAGIAN HUKUM LINGKUP KOORDINASI LINGKUP KOORDINASI LINGKUP KOORDINASI BADAN PENANGG.BENCANA врзкр SEKRETARIAT DPRD DAERAH INSPEKTORAT DINAS KEPENDD & BADAN KEPEGAWAIAN 3. 4. BAPPEDA PENCATATAN SIPIL BADAN PEMB. MASY & DAERAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PEREMPUAN BPMP2T KANTOR KES. BANGSA & DINAS PENDIDIKAN DINAS PERHUBUNGAN & 6. 7. 8. POLITIK DINAS KESEHATAN SATUAN POLISI PAMONG DIPERTANAKHUT DISKOPERINDAG ENERGI & S.D. KOMINFO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN PRA.IA KECAMATAN MINERAL DINAS SOSIAL DAN TENAGA NAGARI KERJA DISPORABUDPAR DINAS KEALUTAN DAN PERIKANAN DINAS PEKERJAAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi **⊿.....** Garis Koordinasi

Bagan 1.1 Struktur Organisasi

Sumber: Bagian Organisasi dan PAN

D/O 1 TERMURIUM



C. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAH PEMBANGUNAN

Isu Strategis

Dalam lima tahun kedepan kabupaten Padang Pariaman akan mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera dengan mengidentifikasi isu-isu strategis. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi ditingkat global, nasional, regional dan lokal melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD) maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Padang Pariaman dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1. Kualitas sarana dan prasarana peribadatan
- 2. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.
- 3. Keragaman dan diversifikasi pangan.
- 4. Peningkatan produksi komoditi unggulan
- 5. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- 6. Intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah
- 7. Peningakatan akses dan layanan pendidikan
- 8. Peningkatan akses dan layanan kesehatan
- 9. Pengembangan destinasi wisata dan budaya lokal
- 10. Peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- 11. Kemudahan akses permodalan
- 12. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah
- 13. Pemanfaatan dan pengendalian Ruang
- 14. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 15. Penyelenggaran tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan bersih.
- 16. Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan.



Permasalahan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2010-2015 telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahapan perumusan isu-isu strategis, permasalahan permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan dirumuskan dalam program dan kegiatan pembangunan.

Permasalahan pokok pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman adalah belum sepenuhnya mempedomani falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dikarenakan masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau.
- 2. Dinamika perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya aktivitas perekonomian rakyat di Kabupaten Padang Pariaman, umumnya belum diimbangi dengan peningkatan taraf kesajahteraan dan peningkatan (Indeks Pembangunan Manusia) IPM secara signifikan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Padang



Pariaman umumnya masih berpendidikan rendah, belum memiliki kemampuan atau daya beli yang layak, dan tidak pula didukung oleh kondisi kesehatan keluarga yang benar-benar memadai, sehingga secara umum kondisi IPM masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih membutuhkan berbagai pembenahan.

- 3. Secara umum, kondisi dan kualitas pendidikan masyarakat masih membutuhkan banyak pembenahan, bukan saja dari segi ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang belum merata, tetapi juga akses dan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan.
- 4. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang dimana rasio puskesmas per satuan penduduk hanya sebesar 0,06. Oleh karena itu layanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan terhadap derajat kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih merata, perbaikan gizi, layanan kesehatan penduduk miskin dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 5. Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya promosi potensi pariwisata dan kurangnya pelaksanaan event-event pariwisata dalam meningkatkan arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Masalah lainnya adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan kepariwisataan, belum adanya ikon wisata dan berdaya saing, tatakelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multi stakeholders serta belum memadainya fasilitas pendukung pariwisata dan belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
- 6. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sesuai dengan data BPS tahun 2014 baru mencapai 8,3%, padahal sektor ini seharusnya mampu memberikan kontribusi yang lebih. Hal ini disebabkan karena masih



kurangnya industri rumah tangga yang memiliki standar minimal kualitas produksi baik dari segi penggunaan teknologi maupun SDM, ketidakjelasan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan hulu dan hilir, keterbatasan akses permodalan untuk pengembangan usaha serta lemahnya jejaring usaha.

- 7. Permasalahan di bidang tata ruang adalah belum memadainya pranata tata ruang khususnya rencana rinci tata ruang, menurunya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau publik, belum optimalnya penggunaan RT/RW dalam pemanfaatan ruang. Hal ini dapat dilihat dari data alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan lainnya.
- 8. Permasalahan bidang Lingkungan Hidup adalah masih tingginya pencemaran lingkungan hidup, belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal, masih tingginya Emisi Gas Rumah Kaca, masih adanya konflik pemanfaatan ruang, kerusakan ekosistem mangrove dan kawasan pesisir.
- 9. Tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman cukup tinggi hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum optimal
 - b. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin
 - c. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan dasar seperti kecukupan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, listrik, ekonomi (modal) dan lain-lain.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin.
- 10. Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan terdapat permasalahan utama antara lain : belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah, penegakan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak azazi manusia, kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip



pemerintahan yang baik, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur, sumber pendapatan asli daerah masih terbatas, belum tuntasnya batas administrasi daerah, pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

11. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana namun isu-isu zonasi ramah bencana belumlah menjadi arus utama (mainstream) dalam perencanaan pembangunan wilayah. Pembangunan pemukiman dan fasilitas umum maupun sosial di sekitar daerah-daerah rawan bencana merupakan bukti nyata yang memperlihatkan eksisnya permasalahan tersebut.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Pemerintah Daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap



pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan Kinerja berisi :

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

erencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerjatahunan yang akan dicapai olehKabupaten Padang Pariaman. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Padang Pariaman dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untukmewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagaiprogram utama Kabupaten Padang Pariaman, yaitu program-program yang dapat menggambarkankeberadaanserta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapioleh Kabupaten Padang Pariaman.

Berkaitan dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.RPJMD dimaksud merupakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan yang



selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.

RPJMD tersebut, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu RPJMD ini juga menjawab tiga pertanyaan dasar, yakni: (1) kemana Kabupaten Padang Pariaman akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

A. VISI DAN MISI

Dari berbagai macam isu strategis pada semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka menengah (2016-2021) adalah sebagaimana tertuang dalam "Visi dan Misi pembangunan" yaitu :

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera"



Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Menjadikan Kabupaten yang unggul, Masyarakat Religius, Mewujudkan Masyarakat Cerdas, dan Masyarakat yang Sejahtera, secara lebih terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Baru* yang dimaksud adalah suatu perubahan wajah, ruang dan suasana Kabupaten Padang Pariaman
- b. *Religius* yang dimaksudkan disini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh kepada ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari
- c. *Cerdas* dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang berkualitas dan berilmu pengetahuan.
- d. *Sejahtera* dalam hal ini dimaksudkan adalah kondisi tercapainya taraf kehidupan yang layak dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

2. Misi

Untuk mencapai Visi "Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera" ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.
- d. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
- f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.



g. Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016. Setelah RPJMD tersebut disusun pada tahun 2016 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016, sehingga tersusunlah perjanjian kinerja (PK) Bupati Padang Pariaman tahun anggaran 2016.

Sebelumnya PK telah ditetapkan oleh Bupati Padang Pariaman pada awal tahun 2016, namun perjanjian kinerja tersebut masih mengacu pada RPJMD periode 2010-2015, sehingga ada beberapa perjanjian kinerja yang harus direvisi melalui perjanjian kinerja baru dengan mengacu pada RPJMD 2016-2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Bupati. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati dan pada akhir tahun akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pemerintahan daerah. Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman TA. 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Mengacu ke RPJMD 2010-2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan	Peringkat Dalam MTQ Tingkat Sumbar	peringkat 5
		Peningkatan Majlis Taklim Aktif	0.04%
		Peningkatan Jama'ah Haji Daerah	90.00%



2	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan yang bersikap dan berperilaku anti korupsi, kolusi dan	Opini BPK	WTP
	nepotisme, responsif, transparan, akuntabel serta beretika, dan berwibawa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	В
3	Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8,4%
		Angka Melek Huruf	99%
4	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	72.56
5	Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, produktiffitas dan berdaya	Tingkat pengangguran terbuka	9.38%
	saing tinggi dengan pelatihan keterampilan berorientasi penempa tan dan kemandirian tenaga kerja.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	3,2%
6	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	5.79
		Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	20.46
		Produksi perikanan tangkap (ton)	24,444.50
		Produksi perikanan budidaya (ton)	23,879
		Tingkat Pendapatan pembudidaya/bulan (Rp.)	2,415,765
		Tingkat Pendapatan nelayan/bulan (Rp)	1,656,604
		Persentase kontribusi usaha perikanan terhadap PDRB	5%
7	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan	Jumlah Koperasi Sehat	10
	koperasi	Jumlah UMKM yang aktif	11,250
8	Meningkatnya investasi berbasis ekonomi kerakyatan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	333 M
9	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Kunjungan wisata (jumlah orang)	3600 orang
10	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Persentase peningkatan hutan rakyat	112 Ha



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Mengacu ke RPJMD 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peran lembaga pendidikan islam yang aktif di Nagari	Peningkatan Majlis Taklim Aktif	70%
2	Meningkatkan keragaman pangan	Peningkatan produktivitas pangan - Padi per hektar - Jagung per hektar	5,11 Ton GKG 8,02 Ton / AH
3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	42,9 Juta Rp
4	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi	Persentase Realisasi Investasi	35%
5	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	8,5 tahun
		Angka melek huruf	93,5%
6	Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan	Angka harapan hidup	67,84 tahun
7	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase kunjungan wisata	10,06 %
8	Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	0,87
9	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	60%
10	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,50%
11	Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,87%
12	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	nilai CC
13	Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
14	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	72,86%
15	Meningkatnya penanganan tanggap darurat	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	14 menit



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Perencanaan Kinerja berisi:

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Evaluasi dan AnalisisCapaian Kinerja
- D. Realisasi Keuangan
- E. Capaian Prestasi dan Penghargaan

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah berorientasi untuk mendorong perubahan di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level keluaran hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam Bab III ini akan diuraikan: (1) Pengukuran Kinerja (2) Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 (3) Evaluasi dan Analisis Capaian.



A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerjadi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerjaatausemakinrendahrealisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja =
$$\frac{\text{Target - (Realisasi -Target)}}{\text{Target}} \ge 100\%$$
Atau

Capaian indikator kinerja =
$$\frac{(2x \text{ Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \ge 100\%$$
Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasitarget penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori				
>100	Sangat Berhasil				
90< s.d <u><</u> 100	Berhasil				
80 <s.d. <u=""><90</s.d.>	Cukup Berhasil				
70 <s.d<u><80</s.d<u>	Kurang Berhasil				
<u><</u> 70	Tidak Berhasil				

Sumber: Permendagri 54 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th 2003, diolah



B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tabel 3.2

•	ω				1	2					N N
	Meningkatnya pendapatan masyarakat			pangan	keragaman	Meningkatkan	islam yang aktif di Nagari	peran lembaga pendidikan	Terwujudnya	Strategis	Sasaran
	PDRB per kapita	Jagung per hektar	Padi per hektar	Pangan	Produktivitas	Peningkatan		lakiiii yang aku	Persentase Majlis		Indikator Kineria
	PDRB Perkapita Tahun sekarang — PDRB Perkapita Tahun lalu r 100%			e romaneo en a pengura a uma senarang — er amaneo en a pengura a uma - en	Dan da hitaritan man san Tahan milanan — Danda hitaritan man ann Tahan Isla		Jumlah Majlis Taklim Aktif Jumlah Majlis Taklim yang ada			Indikator Kinerja	Cara Pengukuran
$\frac{reausasi}{taget}x$ 100	realisasi taget x 100			rager	$\frac{realisasi}{x \pm 00}$		$\frac{realisasi}{taget} x 100$			Kinerja	Rumus Pengukuran
·	42,9 Juta Rp	GKG 8,02 Ton / AH	5,11 Ton						70%	1 21 8	Target
	39,29 Juta Rp	8,1 Ton / AH	5,18 Ton GKG						65%	Realisasi	Kinerja
	91,58	101,00	101,57						92,85	%	ja
	Berhasil				Berhasil	Sangat			Berhasil		Kategori



6		5	4
Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan		Meningkatnya tingkat pendidikan	Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi
Angka harapan hidup	Angka melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Persentase Realisasi Investasi
Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya	Jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki	ļumlah Realisasi Investasi Tahun Sekarang — Jumlah Realisasi Investasi Tahun Lahu Jumlah Realisasi Investasi Laku
realisasi taget	$rac{realisasi}{taget}$ x 100	realisasi taget x 100	
67,64%	93,5%	8,5 tahun	35%
67,64%	96,32%	6,89 tahun	349,01%
100	103,01	81,05	997
Berhasil	Sangat Berhasil	Cukup Berhasil	Sangat Berhasil



11	10	9	8	7
Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa transportasi	Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Tingkat pengganguran terbuka	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persentase kunjungan wisata
Jumlah Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja	ļumiah Penduduk diatas garis kemiskinan — Jumlah Penduduk diatas garis kemiskinan Tahun Lalu Jumlah Penduduk diatas garis kemiskinan Tahun Lalu x 100%	Panjang jalan dan jembatan kondisi baik Panjang jalan dan jembatan	Luas ruang terbuka hijau Luas Wilayah	lumlah Wisatawan Tahun Sekarang — Jumkah Wisatawan Tahun Lalu Jumlah Wisatawan Tahun Laku
(2 x turget) realisasi tuget	realisasi taget x 100	realisasi taget x 100	realisasi taget x 100	$\frac{realisasi}{taget} x 100$
11,87% *100	91.50%	60%	0,87	10,06%
5,8%	91.14%	43,04%	0,94	45,45%
99.60	99.60	71,73	108	451,78
Berhasil	Berhasil	Kurang Berhasil	Berhasil	Berhasil



	л .		12
penanganan tanggap darurat	indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan Opini BPK terhadap laporan keuangan	Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintah yang baik dan bersih
tanggap (response time rate)	Kepuasan Layanan Masyarakat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK) yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit Jumluh Kusus Kebukurun dalam jungkutun WMK x 100%	Total dari Nilai Persepsi per unsur Total unsur yang terisi x nilai penimbang	Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
(7 % lasget) — realismus x 10	realisasi taget x 100	realisasi taget x 100	realisasi taget x 100
* 100 menit	12	WTP	CC
menit	1200	WTP	CC
(03	100	100
	D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Berhasil	Berhasil



C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan. Awaltahun 2016 yang merupakan awal tahun RPJMD 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Padang Pariamanberupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 15 (lima belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peran lembaga pendidikan islam yang aktif di Nagari

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi sebagaimana dalam **RPJMD** 2016-2021 pertama tertuang yaitu "Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas falsafah berdasarkan adat basandi syarak basandi syarak, kitabullah"Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama, capaian kinerja sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Sasaran Strategis 1

	Indikator	Satuan	Relisasi Tahun 2015	Tahun 2016			
No	Kinerja Utama			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Majelis taklim yang aktif	%	70	70	65	92,85	Berhasil

Pada Indikator Kinerja Utama pertama ini persentasemajelis taklim yang aktif ditargetkan 70% dapat terealisasi sebesar 65% atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi capaiannyamasuk dalam kategori **berhasil** yaitu sebesar 92.85%.



Tidak tercapainya target pada sasaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberadaan majelis taklim. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah majelis taklim yang aktif pemerintah Padang Pariaman melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada majelis taklim se-Padang Pariaman secara berkelanjutan. Tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan sosialiasasi dan pembinaan majelis taklim ini merupakan upaya memaksimalkan peran dan fungsi majelis taklim di dalam lingkungan masyarakat yakni:

- 1. Memperkuat fungsi majelis taklim sebagai tempat pengajaran agama islam secara luas, yang meliputi pengkajian tentang pokok ajaran islam dan kaitannya dengan persoalan yang dihadapi umat sehari-hari.
- 2. Meningkatkan fungsi majelis taklim dari tempat penyelenggaraan pengajian menjadi tempat menyiapkan generasi yang akan datang.
- 3. Mengembangkan fungsi mendidik dan membantu jamaah untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya dan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi jamaah.
- 4. Sebagai pusat pengembangan keterampilan jamaah.
- 5. Meningktakan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan sosial.
- 6. Sebagai wadah silaturahmi, yakni majelis taklim mampu memberikan pembinaan solidaritas sosial yang kuat antar umat islam melalui silaturahmi.
- 7. Fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi.
- 8. Majelis taklim sebagai lembaga Kontrol sosial.











Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 1 adalah:

- a. Hubungan pengurus Majlis Taklim dengan Pemerintah Kabupaten kurang intens.
- b. Belum terkoordinir secara maksimal terhadap kelompok majelis taklim ini.
- c. Masih belum tersampainya fungsi keberadaan majelis taklim keseluruh masyarakat yang ada diKabupaten Padang Pariaman.
- d. Belum terlaksananya manajemen partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan jaringan kerjasama pada majelis taklim.

Hambatan dan Masalah

- a. Masih belum terdatanya seluruh majelis taklim yang ada di Padang Pariaman.
- b. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman menyangkut setiap majelis taklim atau kelompok pengajian di daerah harus terdaftar untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

* Strategi pemecahan masalah:

- a. Melakukan Pembinaan dan pemantauan secara berjenjang terhadap fungsi keberadaan majelis taklim ditengah masyarakat.
- b. Optimalisasi fungsi lembaga majelis taklim yang aktif sehingga dirasakan dampak dari hadirnya majelis taklim pada masyarakat.
- c. Menguatkan peran koordinasi pemerintah daerah dengan kelompok majelis taklim dengan melibatkan organisasi islamuntuk meningkatkan dakwah islamiah dan pendidikan islam ditengah masyarakat.
- d. Menciptakan program dan kegiatan yang mampu menjadi daya ungkit untuk mencapai optimalisasi fungsi lembaga majelis taklim di Nagari.
- e. Untuk kedepannya lebih diutamakan pembinaan kepada majelis taklim yang ada.



Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Keragaman Pangan

Sasaran Strategis 2 merupakan salah upaya untuk mencapai Misi ke- II Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu "Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa". Pencapaian sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.Pengukuran capaian sasaran tersebut mengunakan indikator kinerja utama yaitu peningkatkan produktivitas pangan yang dilihat dari jumlah produktivitas padi dan jagung. Hasil pengukuran indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pengukuran Sasaran Strategis 2

		Indikator		Realisasi	Realisasi Tahun 2016				
N	No	Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
	1	Peningkatan produktivitas pangan. a. Padi b. Jagung	Ton GKG	5.05 7,82	5,11 8,02	5,18 8,10	101,57% 101,00%	Sangat Berhasil Sangat	
		b. daguing	1011/1111	7,02	0,02	0,10	101,0070	Berhasil	

Pencapaian indikator peningkatanproduktivitas padi dan peningkatan produktivitas jagung termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Produktivitas padi yang ditargetkan sebesar 5,11 Ton/Ha dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG), terealisasi sebesar 5,18 Ton/Ha dengan capaian sebesar 101,57%. Realisasi ini berhasil melampaui target sebesar 1,57%. Demikian pula halnya dengan indikator peningkatan produktivitas jagung. Realisasi produktivitas jagung berhasil melampaui target sebesar 1,00% dari target yang ditentukan. Produktivitas jagung yang ditargetkan sebesar 8,02 Ton/Ha, terealisasi sebesar 8,10 Ton/Hadengan capaian sebesar 101,00%.

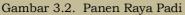


Pada tahun 2015, nilai capaian target sebesar 92,40% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya serangan hama tanaman pangan akibat serangan hama ini, 293,75 Ha tanaman padi gagal panen. Penyebab lain berupa rendahnya Indek Pertanaman (IP) akibat musim kemarau, sehingga lahan sawah yang mengandalkan irigasi tadah hujan tidak mendapatkan suplai air. Namun, pada tahun 2016, produktifitas padi dan jagung tidak hanya melampaui target namun juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Produktifitas padi mengalami peningkatan sebesar 0,13 %, sedangkan produktifitas jagung meningkat sebesar 0,28%. Perkembanganproduktivitas tanaman pangan disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 3.4 Produktifitas Komiditi Pangan

	Komoditi	Produ	Produktifitas (Ton/Ha)					
No.		2015	2016	Peningkatan	Ket.			
1.	Padi	5,05	5,18	0,13				
2.	Jagung	7,82	8,10	0,28				







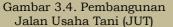
Gambar 3.3. Panen Jagung

Keberhasilan tersebut didukung oleh upaya-upaya solutif yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan. Diantaranya adalah membangun/merehabilitasi sarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi ketiap areal/lahan kelompok tani.



Pembangunan sarana irigasi ini didukung Kegiatan Peningkatan Produktivitas Produksi Pertanian(DAK Bidang Pertanian) dan Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian melalui Peningkatan Produktivitas Lahan dan Air (HIBAH WISMP). Output dari kegiatan ini berupa tersedianya jaringan irigasi tersier, dam parit, pompanisasi/pipanisasi dan jalan usaha tani.







Gambar 3.5. Pembangunan Jaringan Tersier



Gambar 3.6. Pembangunan Dam Parit

Selain itu, dilakukan pemberian bantuan dan pinjaman alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa pompa air, alat pengolahan tanah (handtracktor) kepada masyarakat tani.Melalui Kegiatan Operasional Brigade Tanam, masyarakat tani dapat meminjam pakai handtractor dengan mengajukan surat permohonan peminjaman.



Gambar 3.7. Penyerahan *Handtraktor* kepada Kelompok Tani



Gambar 3.8. Armada Brigade Tanam





Pada teknis budidaya, dilakukan transfer teknologi-teknologi baru kepada masyarakat tani dengan menerapkan teknologi tanaman padi yang dikenal dengan tanaman jajar legowo. Manfaat penerapan pola tanam jajar legowo ini yakni: 1). Jumlah anakan tanaman padi 3.9. Teknik Penaman Padi Pola Tanam Jajar Legowo semakin banyak, 2). Produktivitas

padi akan meningkat, 3). Kualitas gabah akan semakin bagus, 4). Menggurangi tingkat serangan hama dan penyakit, 5). Mempermudah perawatan dan pemupukan, dan 6). Dapat menghemat penggunaan pupuk. Kemudian untuk menimalisir kerugian petani akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pangan terutama hama tikus, dilakukan pengendalian hama dengan melibatkan stakeholders yang terkait seperti Danramil dan jajarannya, pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari serta kelompok tani. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (*Flame Blower*).





Gambar 3.10. Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemberantasan Hama Tikus

* Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 2 adalah:

- 1. Sarana irigasi yang memadai sehingga dapat menjamin ketersedian air bagi masyarakat tani.
- 2. Ketersediaan alat pertanian yang memudahkan dan mempercepat proses bercocok tanam.



- 3. Penerapan teknologi budidaya yang tepat pada masyarakat tani.
- 4. Adanya kerjasama dan dukungan yang solid antara *stakeholders* yang terkait seperti Danramil dan jajarannya, pemerintahan kecamatan, pemerintahan nagari serta kelompok tani dalam pemberantasan hama tanaman pangan.

* Hambatan dan Masalah:

- a. Alih fungsi lahan dari persawahan menjadi pabrik, sehingga terjadi pergeseran arah pembangunan ke sektor jasa dan industry.
- b. Serangan hama yang beresiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian
- c. Cuaca yang tidak kondusif.
- d. Masih ada masyarakat tani yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi budidaya tani.

* Strategi Pemecahan Masalah:

- a. Pembangunan/ rehabilitasi sarana irigasi.
- b. Pemberian bantuan/pinjaman alat pertanian melalui kegiatan Operasional Brigade Tanam.
- c. Transfer dan penerapan teknologi budidaya padi yang dikenal dengan tanam jajar legowo.
- d. Penanganan hamayang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (Flame Blower).



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Sasaran Strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa". Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ini digunakan 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu :PDRB per kapita. Indikator ini didukung oleh program kegiatan lintas perangkat daerah yang mendukung 17 sektor lapangan usaha dalam perhitungan PDRB.Capaian kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Pengukuran Sasaran Strategis 3

	No	Indikator Kinerja Utama	0 4	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016				
			Satuan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
	1	PDRB per kapita	Juta Rp	35,07	42,90	39,29	91,58	Berhasil	

^{*}Sumber: Data BPS 2016 diolah.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Pada tahun 2016 realisasi PDRB per kapita di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 39,29juta rupiah, hal ini belum mencapai target 100% dari yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 42,90 juta rupiah. Meskipun demikian pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **berhasil**, karena mencapai 91,58 % dari target yang telah dirumuskan.Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pencapaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator kinerja PDRB per kapita dapat dikategorikan sangat berhasil.

Capaian PDRB per kapita tahun 2015 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi peningkatan PDRB yang cukup signifikan.Pertumbuhan PDRB perkapita mengalami peningkatan yang menyiratkan bahwa pertumbuhan penduduk terutama migrasi dari luar daerah lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB per kapita ini akan semakin meningkat apabila terciptanya perluasan kesempatan kegiatan



ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru, sekaligus mengembangkan kerja sama dengan pihak investor dari luar.

Tabel laju pertumbuhan dan kontribusi persektor lapangan usaha pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.6 Sektor yang mempengaruhi PDRB

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,84	21,81	
2	Pertambangan dan Penggalian	6,59	5,90	
3	Industri Pengolahan	3,37	13,54	
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,41	0,03	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,21	0,05	
6	Konstruksi	5,31	8,02	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	9,79	
8	Transportasi dan Pergudangan	9,84	22,49	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	dan 6,81		
10	Informasi dan Komunikasi	9,48	3,78	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,82	1,58	
12	Real Estat	4,76	1,02	
13	Jasa Perusahaan	7,46	0,08	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,54	5,03	
15	Jasa Pendidikan	7,01	4,33	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	0,58	
17	Jasa lainnya	6,00	1,18	
	PDRB	6,13	100,00	

Jika dilihat dari capaian PDRB maka berdasarkan data dari 17 lapangan usaha, 5 sektor lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Transportasi dan Pergudangan (Kontribusi sebesar 22,49%)



- 2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kontribusi sebesar 21,81%)
- 3. Industri Pengolahan (Kontribusi sebesar 13,54%)
- 4. Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kontribusi sebesar 9,79%)
- 5. Kontruksi (Kontribusi sebesar 8,02%)

Sementara jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, 5 lapangan usaha yang mendominasi PDRB Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1. Transportasi dan Pergudangan (laju pertumbuhan : 9,84%)
- 2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (laju pertumbuhan : 9,84%)
- 3. Informasi dan Komunikasi (laju pertumbuhan : 9,48%)
- 4. Jasa Perusahaan (laju pertumbuhan : 7,46%)
- 5. Jasa Pendidikan (laju pertumbuhan :7,01%)

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui dinas dinas berikut tahun 2016 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan melalui program:
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
 - Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
 - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
 - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- 2. Dinas Koperindag ESDM melalui program:
 - Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
 Usaha Kecil Menengah
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja melalui program:
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 4. Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 5. Dinas Pekerjaan Umum
 - Program Peningkatan Jalan & Jembatan
 - Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
 - Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
 - Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
 - Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- 8. Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



- 9. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Kemitraan
 - Program pengembangan Destinasi Pariwisata
- 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 - Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

* Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran 3

Selain program-program yang telah dilaksanakan diatas oleh SKPD terkait, keberhasilan pencapaian sasaran 3 juga didukung oleh :

- 1. Adanya komitmen dan konsistensi kepala daerah untuk peningkatan daya saing daerah, yang tidak hanya bergantung dari anggaran pembangunan daerah (APBD Kabupaten) yang telah dianggarkan namun juga melakukan upaya untuk terus menggaet dana-dana pembangunan dari luar agar masuk ke daerah Kabupaten Padang Pariaman baik melalui dana APBN, APBD Propinsi maupun dana lainnya yang bertujuan untuk pengembangan daerah Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhannya.
- 2. Bandara Internasional Minangkabau yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki faktor yang cukup strategis yang jika dikelola dan diberdayakan secara optimal akan mendukung upaya peningkatan PDRB Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan. Dengan adanya Bandar udara ini berdampak positif multiplyer effect seperti munculnya sarana jasa penjualan tiket, transportasi, warung-warung di sekitar bandara yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.





Gambar 3.11. Bandara Internasional Minangkabau (BIM)

- 3. Proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan di daerah ikut mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah/masyarakat.
- 4. Pembangunan dan operasional Kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) yang terletak di Pantai Tiram Kabupaten Padang Pariaman dengan Luas: 40 Hektar dengan Anggaran 1,5 Trilyun Rupiah.

Beroperasinya balai tersebut telah membuka peluang usaha masyarakat sekitar seperti tempat photocopy, jasa laundry, warung makan dan prasarana pendukung kampus lainnya untuk kepentingan akademis dan mahasiswa.





30

Gambar 3.12. Pembangunan Kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP)

5. Pembangunan dan operasional MAN Insan Cendekia tahun 2016 yang terletak di Nagari Sintuk seluas 10 hektar hal ini dapat menjadikan nilai tambah sektor perekoniman bagi masyarakat sekitarnya seperti usaha fotocopy, warung makan dan kantin, loundry, warnet, transportasi lokal dan usaha-usaha kecil lainnya.







Gambar 3.13. Pembangunan MAN Insan Cendikia

6. Program Strategis pengembangan infrastruktur jalan di Propinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Pembukaan Jalan alternatif (jalan lingkar) Padang By Pass (Duku) – Buayan – Sicincin - Koto Mambang – Malalak - Agam di Kabupaten Padang Pariaman ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Gambar 3.14. Jembatan Batang Anai

* Hambatan dan Masalah:

- 1. Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor ikut mempengaruhi terhambatnya pembangunan sektor ekonomi daerah dan minat investor dari luar untuk melakukan investasi
- 2. Permasalahan dan status tanah adat yang ikut mempengaruhi terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sektor ekonomi
- 3. Penyakit masyarakat yang berkembang seperti peredaran narkoba akan mempengaruhi kualitas SDM generasi muda



* Strategi Pemecahan Masalah:

Untuk tahun yang akan datang pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mengelola sumber ekonomi lokal yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi wilayah yang ditandai dengan peningkatan PDRB riil perkapita melalui :

- 1. Menciptakan dan perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru
- 2. Peningkatan sektor-sektor lapangan usaha dan produksi masyarakat
- 3. Penumbuhan dan pengembanagan sektor ekonomi produktif lokal melalui upaya pengembangan produk unggulan daerah, kecamatan dan nagari secara terpadu dan berkelanjutan
- 4. Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat
- 5. Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui jaminan fasilitasi penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah
- 6. Pengembangan SDM masyarakat dalam upaya pengembangan usaha produktif masyarakat
- 7. Upaya pengembangan kerjasama dengan pihak investor dari luar
- 8. Upaya peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan
- 9. Sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi

Sasaran Strategis 4 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 2 yaitu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Padang Pariaman.Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama.Capaian kinerja sasaran strategis 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabe!	l 3.7	Pengu	kuran	Sasaran	Strategis 4
-------	-------	-------	-------	---------	-------------

	Indikator Kinerja Utama		Relisasi	Tahun 2016			
No		Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	30	35	349,01	997	Sangat Berhasil

Capaian realiasi Persentase Kenaikan Realisasi Investasi melewati 100% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015 yang hanya memperoleh realisasi sebesar 30%.

Besarnya realisasi investasi dikarenakan PT.Bumi Sarimas Indonesia, yang berlokasi di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai melakukan perluasan (Izin Prinsip Perluasan) dengan nilai investasi sebesar Rp. 586,9 milyar kemudian PT. Statika Mitra Sarana sebesar Rp. 12 milyar serta PMDN lainnya yang mempunyai nilai investasi diatas Rp. 500 Juta.





Gambar 3.15 Perusahaan yang berinvestasi di Padang Pariaman

Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi investasi tersebut dengan melaksanakan beberapa program diantaranya:

a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Kabupaten Padang Pariaman mengikuti kegiatan promosi yang bertujuan untuk menggaet investor untuk berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman. Bagi investor yang telah berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman, BPMP2T juga melakukan upaya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (PMA/PMDN) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.



- b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

 Melalui program ini telah dilakukan upaya Penyederhanaan Proses
 Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal untuk
 mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif di Padang
 Pariaman, sehingga proses perizinan lebih akutabel, efektif dan efisien.
 Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk penyusunan draft Ranperda
 (Rancangan Peraturan Daerah) yakni draft ranperda IMB, Izin Lokasi,
- c. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu

 Operasional Pelayanan Perizinan Secara Elektronik yang diwujudkan penggunaan aplikasi untuk memberikan pelayanan perizinan. Aplikasi yang digunakan adalah:

IUJK dan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian

- SiPADU, yang dapat dugunakan untuk Layanan Terpadu untuk Publik
- Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
- Sistem Informasi Perusahaan Online (SIPO)

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 4 adalah:

a. Iklim investasi yang kondusif

Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Penyederhanaan Prosedur Perizinan
- c. Wilayah Padang Pariaman yang strategis untuk mendistribusikan hasil produksi.
- d. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penerapan aplikasi pelayanan terpadu SiPADU dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya di Pendopo Delta Wibawa Bupati Sidoarjo, Jawa Timur yang dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya tingkat pendidikan

"Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik". Untuk mengukur capaian Sasaran strategis ini digunakan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Untuk capaian ke dua indikator tersebut didukung langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 5

No	Indikator Kinerja		Realisasi	Tahun 2016				
	Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,88	8,5	6,89	81,05	Cukup Berhasil	
2	Angka Melek Huruf	Persen	90,39	93,5	96,32	103,01	Sangat berhasil	

Realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 96.32% dari target 93,5%. Pada tahun 2016 ini realisasi capaiannya menunjukkan hasil yang sangat berhasil yaitu sebesar 103,01%.

1. Angka Rata-rata Lama Sekolah



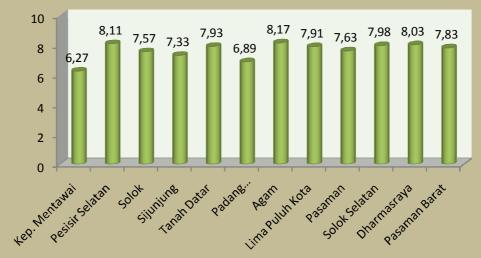
Gambar 3.16 Jenjang pendidikan sebagai syarat wajib

Pada tahun 2016 realisasi angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 6,89tahun, hal ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 8,5 tahun.



Meskipun demikian pengukuran terhadap capaian kinerja untuk indikator ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya **Berhasil**, karena mencapai 81,05 % dari target yang telah dirumuskan.Sedangkanrata-rata lama sekolah berdasarkan data dari BPS menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015 disajikan sebagai berikut:

Grafik. 3.1
Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2015



Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2016

Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

2. Angka Melek Huruf



Gambar 3.17 Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf fokus

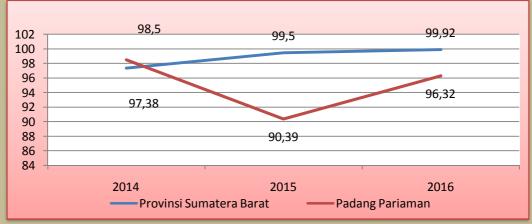
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Target penuntasan buta aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan

untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial.



Realisasi kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian 96.32% dari target 93,5%. Pada tahun 2016 ini realisasi capaiannya menunjukkan hasil yang sangat berhasil yaitu sebesar 103,01%.

Grafik 3.2 Perbandingan angka melek huruf antara provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 s/d 2016



Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2016

Menurut data grafik diatas angka melek huruf Kabupaten Padang Pariaman lebih rendah bila dibandingkan dengan angka melek huruf Provinsi Sumatera Barat. Namun pada tahun 2016 indikator angka melek huruf di Padang Pariaman mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 90,39% ke 96,32% dengan capaian 103,01%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 5 adalah:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Menengah
- c. Program Pendidikan Non Formal
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



Hambatan dan Masalah

- a. Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya "marantau", ikut saudara berdagang ke daerah lain.
- b. Terkait dana untuk meminimalisir angka melek huruf yang masih kurang.

Strategi pemecahan masalah:

- a. Menambah anggaran operasional sekolah.
- b. Mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.
- c. Perlu penganggaran yang lebih tepat dan memadai.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan

Sasaran Strategis 6 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama. Capaian kinerja sasaran strategis 6 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 6

	Indikator		Relisasi		Tahun 2016				
No		Kinerja Utama		Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
	Angka Hidup	Harapan	Persen	67,24	67,64	67,64	100%	Berhasil	

Dari tabel di atas terlihat bahwa bila dibandingkan dengan tahun 2015 angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 67,24 menjadi 67,64. Dan bila dibandingkan dengan target capaian, Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2016 ini berhasil meraih target yaitu 67,64.





Gambar 3.18 Lauching Program Padang Pariaman Sehat

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tetap melanjutkan kegiatan Padang Pariaman Sehat yang telah dilaunching sejak tahun 2015 oleh Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman. Program Padang Pariaman Sehat

ini merupakan salah satu indikator yang menjadikan keberhasilan pada target ini serta didukung oleh program-program lain telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam pencapaian target ini.

Padang Pariaman Sehat sebuah program kebijakan Pemkab Padang Pariaman yang berkeinginan menciptakan kondisi yang sehat bagi warga Padang Pariaman yang bertujuan memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan terhadap masalah kesehatan dimasyarakat. Pelayanan kesehatan diberikan secara maksimal dengan memegang prinsip berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Padang Pariaman Sehat adalah paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana sebelumnya bidan desa dan semua petugas kesehatan lainnya hanya menunggu masyarakat di puskesmas, sekarang menjemput bola dengan mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang yang bermasalah kesehatannya, jika ada langsung diobati apabila perlu dirujuk ke rumah sakit dan seluruh biaya di tanggung oleh pemerintah. Program ini melibatkan seluruh pihak supaya masyarakat miskin yang berobat agar bisa "dikeroyok bersama" untuk memberikan pelayanan kesehatan. Contohnya Wali Korong, Wali Nagari, Camat berperan dalam pengurusan BPJS dan bantuan Badan Amil Zakat.

Sehingga si pasien tidak perlu untuk mengurus segala bentuk proses administrasi berobat. Masyarakat benar-benar dilayani se prima mungkin oleh Pemerintah Kabupaten. Dengan adanya Program Padang pariaman Sehat mengakibatkan:

1. Terwujudnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan



2. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai dan profesional.



Gambar 3.19 Puskesmas Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang

- 3. Tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu dan aman
- 4. Teratasinya kasus-kasus penyakit dan masalah kesehatan yang ditemukan langsung oleh bidan desa dan petugas kesehatan dan segera ditindaklanjuti
- 5. Tersedianya tepat, tenaga, peralatan, obat dan bahan habis pakai yang cukup difasilitas pelayanan persalinan



Gambar 3.20 Tenaga Kesehatan Puskesmas Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

- 6. Terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan yang dilaksanakan oleh tenaga yang profesional
- 7. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir dalam masalah kesehatan lainnya.



8. Tersedianya biaya melalui Badan Amil Zakat Nasional Daerah Padang Pariaman



Gambar 3.21 Kantor Badan Amil Zakat Nasional Daerah Padang Pariaman

Beberapa keberhasilan telah dicapai Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan Tahun 2016 adalah :

- 1. Penunjukkan Kab. Padang Pariaman sebagai tempat pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2016 oleh Menteri Kesehatan (Ibu Nila F Moeloek)
- 2. Memperoleh penghargaan Ksatria Bakti Husada : Dalam rangka penilaian kepala daerah dalam menunjang program kesehatan
- 3. Memperoleh penghargaan Swasti Saba Padapa yaitu penghargaan untuk Kabupaten Sehat.





- 4. Penunjukkan Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat launching gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dari 10 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan.
- 5. Terakreditasinya 4 Puskesmas di Kab. Padang Pariaman dengan prediket Madya dari Kementrian Kesehatan yaitu Puskesmas Kayu Tanam, Puskesmas Pauh Kambar, Puskesmas Pasar Usang dan Puskesmas Lubuk Alung.



6. Launchingnya aplikasi Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman yaitu Padang Pariaman Sehat (Papa Sehat), E-Puskesmas dan E-Surenggarkes

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 6 adalah:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagaiprogram dan kegiatan, adapun program yang dilaksanakan adalah:

- a. Jampersal Puskesmas
- b. Belanja Bantuan Operasional Puskesmas
- c. Peningkatan Upaya Promosi dan Infomasi Hidup Sehat
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelola UKBM dan Batra Tingkat Puskesmas Bides, Toma dan Kader
- e. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara Dan Mancanegara

Sasaran Strategis 7 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan".

Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman.Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama.Capaian kinerja sasaran strategis 7 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 7

	Indikator Kinerja		Relisasi	Tahun 2016			
No	Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Persentase Kunjungan Wisata	%	10,041	10,06	45,45	451,78	Sangat Berhasil



Capaian Persentase Kunjungan Wisata dari tabel diatas sangat melebihi target yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, dimana target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 10,06 % dengan realisasi capaian 45,45 % dan persentase keberhasilan 451,78 % yang dikategorikan "sangat berhasil".





Gambar 3.22 Pemandu Wisata Lubuk Nyarai

Realisasi pada kondisi akhir RPJMD 2015 jumlah wisatawan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara sebanyak 33.000 orang/wisatawan dengan persentase 10,041 %sementara target wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 36.000 orang/wisatawan namun realisasi kunjungan pada tahun 2016 sebanyak 48.000 orag/wisatawan dengan persentase 45,45 % yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 44.700 orang/wisatawan dan 3.300 wisatawan mancanegara.

Hal ini terjadi peningkatan yang sangat besar ini disebabkan Objek Wisata Unggulan Minat Khusus Treking sudah terkelola dengan baik dengan adanya Pemandu Wisata serta Objek Wisata Religius yakni Makam Syech Burhanuddin yang dikenal dengan kegiatan Basafa Gadang dan Basafa Ketek serta Wisata Bahari dan Kuliner yang banyak dikunjungi oleh wisatawan pada saat liburan sekolah dan liburan lebaran dan ada beberapa objek wisata yang telah mempunyai Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman berperan aktif untuk meningkatkan mampu wisatawan.Para wisatawan banyak berasal dari dalam daerah Sumatera Barat dan luar wilayah Sumatera Barat serta Wisatawan Mancanegara seperti Belanda, Jerman dan Amerika Serikat.

Data kunjungan wisatawan merupakan *hasil estimasi* yang disebabkan oleh tidak dapat dihitungnya jumlah kunjungan secara riil karena tidak



adanya data pendukung untuk mengitung jumlah kunjungan (tidak adanya karcis masuk).

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 7 adalah:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut direalisasikan dalam berbagaiprogram dan kegiatan, adapun program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisatamelalui:

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Adanya promosi pariwisata keluar negeri/daerah untuk
mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.



Gambar 3.24 Promosi Wisata Melalui Situs Resmi Padang Pariaman

- Pengadaan Sarana dan Bahan Promosi Pariwisata

Tersedianya brosur, shoping bag, penunjuk arah, leaflet yang berisikan promosi objek wisata.





Gambar 3.25 Promosi Wisata Melalui Brosur

Partisipasi Pada Even Tour de Singkarak
Dukungan untuk pelaksanaan EvenTour de Singkarak dimana
Padang Pariaman pada Etape 6 menuju Sawahlunto yang
dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2016 yang diikuti oleh 24 Tim
dilaksanakan di Pantai Tiram.



Gambar 3.26 Titik Start Tour de Singkarak di Pantai Tiram

 Pemilihan Cik Ajo dan Cik Ajo
 Merupakan pemilihan untuk menjadi Duta Pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2016 di Sungai Limau





Gambar 3.27 Cik Ajo dan Cik Uniang Tahun 2016

2. Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Terbentuknya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang tujuang untuk pengembangan pariwisata didestinasi masing-masing.
Pokdarwis di Kabupaten Padang Pariaman yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor:
111/KEP/BPP-2015 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dalam Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 14 (empat belas) kelompok, terdiri dari:

- a. Pokdarwis Objek Wisata Nyarai;
- b. Pokdarwis Objek Wisata Pantai Panjang;
- c. Pokdarwis Objek Wisata Baburai;
- d. Pokdarwis Objek Wisata Lubuk Bonta;
- e. Pokdarwis Objek Wisata Baburai Sipisang dan Bukik Sapan;
- f. Pokdarwis Objek Wisata Pantai Tiram;
- g. Pokdarwis Objek Wisata Gua Aie Ilang;
- h. Pokdarwis Objek Wisata Pantai Arta Indah;
- i. Pokdarwis Objek Wisata Air Terjun Sarasah;
- j. Pokdarwis Objek Wisata Bukik Siriah/Mountain View;
- k. Pokdarwis Objek Wisata Air Terjun Pelangi;
- 1. Pokdarwis Objek Wisata Pantai Barcelona;



- m. Pokdarwis Objek Wisata Gasan Lestari; dan
- n. Pokdarwis Objek Wisata Pantai Arta Permai.



Gambar 3.28 Pengukuhan dan Pelantikan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lubuak Bonta Kapalo Hilalang Kec 2 X 11 Kayu Tanam

3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek pariwisata unggulan
 Pengembangan pembangunan di beberapa objek wisata



Gambar 3.29 Destinasi Wisata Andalan Padang Pariaman

- Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata
 Tersedianya sarana dan prasarana diobjek wisata
- Pelaksanaan Festival Pasie Maelo



Tujuan dari pelaksanaan Even Pasie Maelo untuk mengembangan budaya/tradisi yang ada di Kabupaten Padang pariaman yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2016 bertempat di Pantai Tiram.



Gambar 3.30 Promosi Festival Wisata Pasie Maelo

Upaya untuk Perbaikan pengembangan objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman kedepannya akan dilakukan :

- 1. Pengelolaan dan pengembangan objek wisata di Kabupaten Padang Pariaman akan dikerjakan lebih serius lagi dengan cara meningkatkan promosi, melengkapi segala fasilitas yang terdapat di objek wisata serta dengan meningkatkan SDM yang profesional untuk mendukung kegiatan tersebut. Salah satu cara untuk meningkat kualitas SDM tersebut yaitu dengan cara melatihwarga setempat sebagai pemandu dimana lokasi objek wisata tersebut berada.
- 2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.
- 3. Mengoptimalkan Kapasitas Kelembagaan yang mendukung Peningkatan Kinerja
- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana objek wisata di seluruh Kabupaten Padang Pariaman



Sasaran Strategis 8

Mewujudkan Ruang Yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis 8 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama. Capaian kinerja sasaran strategis 8 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 8

	Indilator Vinoria	Satuan	Tahun 2016				
No	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah	persen	0,87	0,94	108%	Sangat Berhasil	

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman berhasil melebihi target indikator kinerja utama rasio luas ruang terbuka hijau. Dengan persentase capaiannya 108%. Realisasi 0,94 diperoleh dengan memperoleh data dari BPS tahun 2016. Data yang dirujuk adalah data Luas Tanah menurut Jenis Penggunaannya. Data-data tersebut adalah :

Tabel 3.12 Data Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)(*)			
1	Pemukiman	7.541,5			
2	Sawah	27.082,5			
3	Tegalan	631,5			
4	Kebun Campuran	16.548,5			
5	Perkebunan Rakyat	36.444			
6	Hutan Belukar	11.230			
7	Lahan terlantar	33.399			
	Total	132.878			

Sumber BPS 2016

(*) Angka sementara

Dari data diatas maka didapatkan Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah dengan cara mengurangkan luas total wilayah Kabupaten



Padang Pariaman dengan pemanfaatan lahan untuk pemukiman. Angka tersebut kemudian dibagi dengan luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman. sehingga didapatkan rasio sebesar 0,94.Keberhasilan dalam pencapaian target karena adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai program, yaitu :

1. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Melalui program ini disosialisasikan kepada masyarakat kelompok peduli lingkungan dan aparatur kecamatan (camat), dalam rangka pemahaman tentang pentingnya pemeliharaan ruang terbuka hijau.Disamping itu melalui program ini juga dilakukan penaman 500 batang bibit pada lokasi ruang terbuka hijau yang telah direncanakan sebelumnya.



Gambar 3.31 Penanaman Pohon Bupati bersama Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup

2. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah : dilakukannya penataan dan pemeliharaan Ruang terbuka hijau di Kabupaten Padang Pariaman. Pada kegiatan penataan RTH melibatkan Sekolah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan pembuatan taman adiwiyata. Pada tahun 2016 ini sekolah yang dilibatkan adalah SDN 14 Nan Sabaris, SDN 13 IV Koto Aur Malintang, SDN 21 Lubuk Alung dan SMAN 1 Lubuk Alung. Sementara itu pada kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan cara



mempertahankan keutuhan tutupan vegetasi, dan pemeliharaan terhadap RTH yang telah ada.



Gambar 3.32 Taman Adiwiyata di SMAN 1 Lubuk Alung

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan dan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (DAK bidang Kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di kecamatan batang anai tepatnya diNagari Kurai Taji. Sedangkan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan pada 14 kelompok tani pelaksana yang tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman diantaranya Kecamatan Lubuk Alung,2x11 Kayu Tanam, 2x11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, Sungai Geringging, VKoto Kampung Dalam, V Koto Timur dan IV Koto Aur Malintang.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program ini dilaksanakan dengan melakukan operasi pengawasan dan pengamanan hutan. Dengan telah dilakukan operasi tersebut berhasil menurunkan angka kerusakan hutan dari 25% pada tahun 2015 menjadi 0% pada tahun 2016.

Sasaran Strategis 9

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jasa Transportasi

Sasaran Strategis 9 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan



lingkungan". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama. Capaian kinerja sasaran strategis 9 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 9

Ī		Indikator Kinerja	Relisasi		Tahun 2016			
	No	Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik	%	43,04	60	43,04	71,73	Kurang Berhasil

Capaian indikator pada sasaranini dapat dilihat dari tabel diatas tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 60 % dengan realisasi capaian 43,04 %. Dengan demikian indikator ini tidak mencapai target dancapaian keberhasilannya dikategorikan **"Kurang Berhasil"** yaitu sebesar 71.73%.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, merupakan indikator yang menggambarkan kualitas infrastruktur jalan baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Indikator ini pada pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebelumnya tidak, namun sesuai dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah Kabupaten Padang pariaman Tahun 2016-2021, indikator ini ditetapkan sebagai salah satu dari Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.14 Proporsi dan Kondisi Jaringan Jalan di Padang Pariaman

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kondisi Baik	524,22	777,40	777,40	964,16	964,16	1.037,02
2	Kondisi Sedang	246,20	400,40	400,40	312,97	412,97	304,41
3	Kondisi Rusak	699,13	1.011,95	1.062,55	963,22	750,62	682,13
4	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, kabupaten/kota)	1.469,55	2.189,75	2.240,35	2.240,35	2.240,35	2.253,09
	Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik	35,67%	35,50%	34,70%	43,04%	43,04%	43,04%

Pada tahun 2016, secara akumulasi dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa



tidak ada perubahan yang signifikan terhadap indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik jika dibandingkan dengan tahun 2015. Apabila dicermati lebih lanjut dengan membandingkan data BPS tahun 2016, kita lihat dari total panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2016 terjadi peningkatan 72,68 km jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik ini bersumber dari peningkatan panjang jalan kabupaten sebesar 143,04 km dan penurunan kondisi panjang jalan provinsi dalam kondisi sebesar 70,18 km.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program pembangunan jalan dan jembatan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : 1). Pembangunan jalan; 2). Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Tahun 2016);





Gambar 3.33 Pembangunan Jalan di Padang Pariaman





Gambar 3.34 Pembangunan Jembatan di Padang Pariaman

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan melalui 5 (lima) kegiatan: 1). Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan; 2). Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK); 3). Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Pendamping DAK); 4). Pemeliharaan rutin jalan; 5). Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Fisik Pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016).







Gambar 3.35 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Padang Pariaman

- 3. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan melalui 3 (tiga) kegiatan : 1). Penyusunan sistem informasi/data base jalan; 2). Monitoring, evaluasi dan pelaporan; 3). Pengawasan Program ke PU an).
- 4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan melalui kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK Trandes).





Gambar 3.36 Pembangunan Jalan di Pedesaan

* Hambatan dan Masalah

- a. Adanya penurunan kondisi jalan provinsi akibat proyek *multi year* pelebaran jalan yang bersumber dari dana loan (pinjaman) tahun 2016-2017 di sepanjang jalan Kecamatan Lubuk Alung menuju Pariaman, dan sepanjang jalan Kecamatan Lubuk Alung menuju Sicincin, sehingga mengakibatkan secara akumulasi terjadinya penurunan kualitas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Padang Pariaman karena untuk mobilitas alat berat dan bahan material seperti batu dan aspalt.
- b. Saluran drainase yang kurang baik dan belum optimal di sepanjang jalan.



55

- c. Belum optimalnya fungsi pengawasan akibat kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan fungsi tersebut sehinga pemeliharaan jalanpun belum optimal.
- d. Adanya penundaan pendapatan yang bersumber dari DAU sebesar Rp.56.752.208.896,- atau 7.24 persen dari asumsi awal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, sehingga terjadinya penundaan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan yang direncanakan untuk tahun 2016.
- e. Adanya pengurangan DAK Fisik minimal 10 persen yaitu sebesar Rp.16.058.013.540,-. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tanggal 8 April 2016, tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, maka dilakukan pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat minimal sebesar 10 persen dari total alokasi dak fisik tahun anggaran 2016, Hal ini juga berdampak signifikan terhadap penundaan pelaksanaan pembangunan jalan yang direncanakan untuk tahun 2016.

* Strategipemecahan masalah:

- a. Percepatan proses pemaketan pekerjaan sehingga alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan jalan ataupun pemeliharaannya dapat dilakukan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia. Hal ini akan meminimalisir hal-hal pemotongan DAU akibat kelalaian pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- b. Peningkatan mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, dengan mempergunakan bahan yang baik walaupun dibenturkan oleh hal biaya yang ada, karena nilai dari suatu proyek ialah kesesuaian dengan metode teknis yang telah direncakan.
- c. Peningkatan pengawasan melalui penambahan kuantitas pegawai di Dinas Pekerjaan Umum sehingga fungsi pengawasan dapat dioptimalkan dan meminimalisir ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan dengan prosedur yang telah ditetapkan.



- d. Mengoptimlkan pemeliharaan jalan melalui saluran drainase yang baik di pinggir jalan karena sistem pembuangan air yang kurang baik akan semakin cepat merusak jalan tersebut.
- e. Optimalisasi dalam perencanaan teknis pembangunan jalan, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sasaran Strategis 10

Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Sasaran Strategis 10 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama. Capaian kinerja sasaran strategis 10 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 10

37 -	Indikator	Carrier and	Relisasi		Tahu	n 2016	
No	Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	persen	91.57	91.50	91.14	99.60	Berhasil

Capaian indikator pada sasaran ini dapat dilihat dari tabel diatas tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 91.50 % dengan realisasi capaian 91.14 %. Meskipun indikator ini tidak mencapai target akan tetapi capaian keberhasilannya dikategorikan "Berhasil" yaitu sebesar 99.60 %.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi akan menekan jumlah kemiskinan, Pemerintah Daerah Padang Pariaman melakukan beberapa strategi kebijakan antara lain:

1. Memacu pembangunan infrastruktur sehingga membuka lapangan kerja dan membuka peluang investasi untuk menekan angka kemiskinan. Infrastruktur meliputi Pembangunan mega proyek bertaraf



- internasional bernilai trilyunan, perbaikan jalan, jembatan, irigasi, sarana pariwisata, perkantoran dan sarana ibadah.
- 2. Selain itu juga meningkatkan bantuan sosial dan ekonomi kerakyatan yang tepat sasaran di antaranya pembangunan rumah tidak layak huni, alat pertanian, bibit pertanian/perkebunan dan perikanan, UMKM dan inovasi lainnya.
- 3. Mengadakan kerja sama antar daerah dengan penggalian dan pemanfaaatan sumber daya potensial saling menguntungkan. Kerja sama daerah dengan pihak swasta seperti pemasaran cokelat dan promosi wisata.
- 4. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan, didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang pro rakyat dan memperkuat substansi, memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan serta pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya:

1. Fasilitasi manajemen usaha bagi KK Miskin berupa pemberdayaan kelompok ternak sapi sebanyak 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (100 orang).



Gambar 3.37 Penyerahan Bantuan Sapi ke Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan hasil sebanyak 7.440 orang. PKH adalah Program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.





Gambar 3.38 Pemberian Bantuan Uang Tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin

3. Renovasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 10 rumah.



Gambar 3.39 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

4. Menyalurkan bantuan beras miskin kepada 21.794 Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada 17 Kecamatan.



Gambar 3.40 Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin

5. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berupa memberikan bantuan sembako kepada kaum lanjut usia sebanyak 60 orang yang berada di 6 (enam) Kecamatan.





Gambar 3.41 Pemberian Bantuan Sembako Kepada Kaum Lanjut Usia

6. Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin sebanyak 950 bantuan.



Gambar 3.42 Pemberian Bantuan Kepada Keluarga Miskin

7. Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat sebanyak 17 pembinaan, dimana yang dilakukan oleh organisasi sosial sebanyak 13 dan oleh latihan pengurus sebanyak 2.



Gambar 3.43 Pelatihan Manajemen Karang Taruna untuk Peningkatan Kualitas SDM

8. Pembinaan dan Rehabiliasi Sosial Masyarakat dilakukan sebanyak 284 pembinaan, dimana cacat tubuh sebanyak 284 pembinaan, cacat mental 115 pembinaan dan bekas penyakit kronis sebanyak 10 orang.





Gambar 3.44 Pembinaan Kepada Penyangang Cacat

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 10 adalah:

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerjamelakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi socialterhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis kesejahteraan sosial.
- e. MeningkatkanProfesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial.

Sasaran Strategis 11

Mengurangi Angka Penggangguran Pada Usia Produktif dan Angkatan Kerja

Sasaran Strategis 11 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi III yaitu "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengukur sasaran



pertama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama.Capaian kinerja sasaran strategis 11 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 11

	NT -	Indikator	Q 4	Relisasi		Tahu	n 2016	
I	Vo	Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,83	11,87	5,8	99.60	Berhasil

Capaian indikator pada sasaran ini dapat dilihat dari tabel menunjukkan kinerja yang baik, dimana target yang ditetapkan sebesar 11.87 % dengan realisasi capaian 5.8 %. Meskipun indikator ini tidak mencapai target akan tetapi capaian keberhasilannya dikategorikan "berhasil" yaitu sebesar 99.60%.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok Tingkat pengangguran. terbuka diukur pengangguran sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja

Hal ini berkat dukungan anggaran pemerintah daerah untuk program

peningkatan kualitas produktivitas kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja. Adapun bentuk kegiatan dukungan tersebut meliputi Kegiatan Penyiapan Kerja Siap Pakai dan Tenaga Bantuan Peralatan Kerja ditambah kegiatan pengadaan dengan peralatan pendidikan dan





Sebagai bentuk dukungan terhadap capaian kinerja tersebut Pemerintah juga menyelenggarakan kegiatan untuk program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

* Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 11 adalah:

- a. Adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat agar siap diterima di dunia kerja.
- b. Adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan mengenai rekrutmen calon tenaga kerja yang siap pakai.
- c. Adanya program magang di beberapa perusahaan.
- d. Menyebarkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.

* Hambatan dan Masalah:

- a. Pendaftar pencari kerja kurang sehingga sedikit yang mengurus dokumen AK 1 (kartu kuning) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Akibat program moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan oleh Pemerintah pusat dari tahun 2011 hingga 2015.
- c. Banyaknya warga terutama yang berada pada usia pencari kerja yang pindah domisili.

* Strategi pemecahan masalah

- a. Menambah jenis-jenis pelatihan.
- b. Menambah instruktur.
- c. Meningkatkan kualitas instruktur.
- d. Menambah kerjasama dengan perusahaan lain.
- e. Menggalakkan semangat kewirausahaan pada generasi muda.
- f. Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal.
- g. Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen AK 1
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak asing terkait dengan rekrutmen/penerimaan tenaga kerja.



Sasaran Strategis 12

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu Misi 6 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dan Bagian Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Capaian kinerja sasaran strategis 12 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun 2016 Relisasi Indikator Kinerja No Satuan Tahun Capaian Utama Target Realisasi Kategori 2015 (%)CC CC Nilai Akuntabilitas Nilai 100 C Berhasil Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 12

Program & Kegiatan Pendukung Indikator, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan Evaluasi **LAKIP** SKPD. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan sasaran ke dua belas (12) dari Misi 6 diperoleh melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kenerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah mencapai nilai CC. Capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan demikian realisasi dari indikator ini telah sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariamanini berhasil meraih 100% nilai capaian, dengan kategori "Berhasil".



LAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 berhasil mendapat nilai CC (50,03).Dimana penilaian tersebut merupakan gambaran sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



LAKIP ini disusun sesuai dengan Gambar 3.47 Penyerahan Hasil LAKIP di Bandung amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, LAKIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih komprehensif.

* Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 12 adalah:

- a. Penguatan komitmen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Tim Inspektorat menbentuk Tim untuk mereview LAKIP SKPD dan LAKIP Kabupaten serta mengevaluasi LAKIP SKPD.
- c. Adanya pendampingan dari Tim reviu Inspektorat terhadap penyusunan LAKIP SKPD dan LAKIP Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Adanya rekonsiliasi data SKPD yang mendukung IKU Kabupaten.
- e. Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi LAKIP dari Inspektorat.



- f. Tim Review Inspektorat melakukan review terhadap LAKIP Kabupaten dengan melihat kesesuaian antara IKU dengan RPJMD, RKPD dan RKT serta PK Kabupaten serta data pendukung lainnya.
- g. Tim Evaluasi LAKIP Inspektorat mengambil 6 (enam) SKPD sampel untuk dilakukan evaluasi terhadap SAKIP SKPD Tahun 2015 yaitu Inspektorat, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan. Hasil Nilai Evaluasi AKIP SKPD tersebut adalah

- Inspektorat : BB

- Dinas Pendidikan : B

- Dinas Kelautan Perikanan : B

- Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan : B

- Bappeda: CC

- Dinas Kesehatan : CC

❖ Hambatan dan Masalah

- a. Hasil Evaluasi LAKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pertimbangan atau *feedback* dalam perncanaan anggaran dan pembangunan tahun berikutnya.
- b. Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan LAKIP sehingga dalam memproses/menginput data masih mengalami hambatan-hambatan tidak tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan.

* Strategi pemecahan masalah:

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dengan melakukan pendampingan, baik dalam memberikan pemahaman tentang sistem manajemen akuntabilitas kepada pimpinan SKPD maupun dalam penyusunan dokumen pelaporan, melalui beberapa upaya berikut:

a. Pendampingan penyusunan LAKIP oleh Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.





Gambar 3.48 Pendampingan Penyusunan LAKIP

b. Mengikuti Coaching Clinic tentang LAKIP di Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.



Gambar 3.49 Coaching Clinic Penyusunan LAKIP

- c. Konsultasi dan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tentang kelemahan dan kesenjangan LAKIP Tahun 2015 (tahun sebelumnya) serta solusi perbaikan kedepan.
- d. Pendampingan intensif oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman selama proses penyusunan LAKIP sebelum melaksanakan Reviu.





BAB III A Cambar 3,50 Pendampingan Penyusunan LAKIP oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman



Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan

Sasaran Strategis 13 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 6: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik" Untuk mengukur capaian Sasaran strategis digunakan indikator kinerja utama yaitu Opini BPK dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan didukung oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuagan dan Aset (DPPKA) dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 13

	Indikator		Relisasi		Tahui	n 2016	
No	Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Berhasil

Dari skor yang telah ditetapkan, maka dapat dihitung nilai capaian dari indikator Opini BPK ini.Nilai capaian indikator Opini BPK ini adalah 100% dengan kategori "**berhasil**".





Nilai target dan capaian dari Opini BPK adalah dalam bentuk penilaian kwalitatif, dengan cara pemberikan skor untuk setiap target dan capaian. Hasil dari setiap Opini BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan terdiri dari 4 (empat) penilaian, yaitu Tidak Menyatakan Pendapat, Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Skor dari masing-masing opini tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.19 Skor Hasil Opini BKP

No	Jenis Opini BPK	Skor
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
2	Wajar dengan Pengecualian (WDP)	3
3	Tidak Wajar	2
4	Tidak Menyatakan Pendapat	1

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh BPK menjadi komponen penting untuk menilai sejauh mana penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan dasar hukum UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka menjalankan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendorong semua Aparatur Sipil Negara untuk bekerja dan mengabdi serta menjalankan tugas secara transparan, beretika dan jauh dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh sebab itu, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan realisasi capaian kinerja pada tingkat yang terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Pada kondisi periode RPJMD Tahun 2010 Opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WDP. Perkembangan Opini BPK di Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Th.	Realisasi	Realisasi Th.	Realisasi
110	Utama	Th. 2012	2013 (*)	Th. 2014	2015 (*)	Th. 2016
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Dalam rangka untuk meningkatkan sasaran diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan berbagai upaya dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan, antara lain:

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan dan Kebijakan KDH
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- c. Program Penataan PeningkatanProfesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

* Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 13 adalah:

- a. Komitemen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) untuk mempertahankan opini WTP sebagai bentuk pengakuan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2015 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- b. Komitmen Bupati Padang Pariaman dan stakeholder terkait (SKPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan hasil pemeriksaan sebelumnya.
- c. Pendampingan Tim Reviu Inspektorat terhadap penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemda.
- d. Tim review Inspektorat melaksanakan review terhadap Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten



70

- Padang Pariaman, hasil dari review sebagai bahan perbaikan dalam penyajian Laporan Keuangan.
- e. Pemanfaatan teknologi SIMDA dalam pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan.
- g. Keberhasilan Padang Pariaman dalam melakukan pengelolaan aset.
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD.
- i. Manajemen pelayanan yang tertata rapi.
- j. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam melakukan pelayanan publik.

Hambatan dan Masalah

- a. Masih ada ASN yang tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Masih ada Kelemahan dalam penyediaan nilai persediaan dan nilai aset tetap diantaranya nilai tanah.
- c. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap.
- d. Karena keterbatasan jumlah sampel dalam melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, besar kemungkinan ada bias dari hasil survey tersebut.

* Strategi pemecahan masalah:

- a. Adanya klinik konsultasi di DPPKA dan Inspektorat sebagai tempat konsultasi terhadap permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Tim Review Inspektorat mendampingi SKPD dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kesalahan dan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai serta dapat membantu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.



Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis 14 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 6 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik" Untuk mengukur capaian Sasaran strategis digunakan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat yang didukung oleh Bagian Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dilakukanlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 14 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 14

Ī		Indikator		Relisasi		Tahu	n 2016	
	No	Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2015	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	71,43	72,86	70,15	96,28	Berhasil

Capaian indikator pada sasaran ini dapat dilihat dari tabel diatas tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sebesar 72,86% dengan capaian realisasi 70,15%. Meskipun indikator ini tidak mencapai target akan tetapi capaian keberhasilannya dikategorikan "Berhasil" yaitu sebesar 96,28%.



Gambar 3.52 Survey IKM Oleh PSKP Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui persepsi dari pengguna layanan terhadap setiap pelayanan di SKPD



Dengan harapan agar seluruh instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang lebih Pariamandapat maju melayani kebutuhan dan respon dari masyarakat. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Padang Pariamanyang merupakan pengguna layanan maka Bagian Organisasi dan PAN



Gambar 3.53 Survey IKM Oleh PSKP

melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Sumbar melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanan Survey indeks kepuasan masyarakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Disamping itu, juga ditunjang dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Unit pelayanan yang menjadi sampel pada survey indeks kepuasan masyarakat ini tahun 2016 adalah Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Kepegawaian Daerah. Hasil survey indeks kepuasan masyarakat masingmasing unit pelayanan diatas adalah:

Tabel 3.22 Sampel Unit Pelayanan Yang Ada di Padang Pariaman

NO	Unit Pelayanan	Nilai	Mutu	Kinerja Unit
		IKM	Pelayanan	Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,14	A	Sangat Baik
2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	68,41	В	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah	73,83	В	Baik
4	Perusahaan Daerah Air Minum	61,64	C	Kurang Baik
5	Badan Kepegawaian Daerah	63,73	В	Baik



Nilai survey indeks kepuasan masyarakat tahun 2016 dengan sampel unit pelayanan tersebut memperoleh nilai rata-rata 70,15 dengan kategori B. Nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Hal ini disebabkan unit pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum yang memiliki kinerja unit pelayanan yang kurang baik.

Hambatan dan Masalah

- a. Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur pada sebagian unit pelayanan.
- b. Belum adanya standar pelayanan pada sebagian unit kerja
- c. Sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang belum mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

* Strategi pemecahan masalah:

- a. Menyusun standar operasional prosedur bagi unit pelayanan yang belum memilikinya.
- b. Menyusun standar pelayanan bagi unit pelayanan yang belum memilikinya.
- c. Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik
- d. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara kontinue untuk mengetahui peningkatan kinerja pelayanan yang telah diberikan.
- e. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan mudah.
- f. Membuat unit pengaduan dan pengelola pengaduan yang kompeten
- g. Menetapkan tarif layanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- h. Menetapkan waktu penyelesaian pelayanan.
- i. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.



Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat

Sasaran Strategis 15 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 7 yaitu "Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana". Untuk mengukur capaian Sasaran strategis digunakan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dilakukanlah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.Hasil capaian indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 15 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran 15

	Indikator Kinerja			Tahu	n 2016	
No	Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	Indikator Kinerja Utama Tingkat waktu tanggap (response time rate)	menit	14	14,9	93%	Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman walau tidak dapat meraih target 14 menit hanya bisa terealisasi 14,9 menit, namun kategori capaiannya dapat dikategorikan "Berhasil".

Tingkat waktu tanggap (response time rate) tahun 2016 sebesar 14 menit merupakan tingkat waktu rata-rata penanggulangan bencana oleh satuan Tugas yaitu Petugas Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat dan Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana (Pusdalops-PB) Kabupaten Padang Pariaman sejak diterimanya informasi tentang kejadian bencana sampai Petugas berada di lokasi bencana. Data mengenai jumlah bencana dan waktu tanggap dari Petugas Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat dan Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana (Pusdalops-PB).



Pencapaian target Tingkat waktu tanggap (response time rate) tahun 2016 sebesar 14 Menit, merupakan tingkat waktu rata-rata penanggulangan bencana oleh satuan Tugas yaitu Petugas Pemadam Kebakaran, Tim Reaksi Cepat dan Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulan Bencana (Pusdalops-PB) Kabupaten Padang Pariaman sejak diterimanya informasi tentang kejadian bencana sampai Petugas berada di lokasi bencana. Hal ini dicapai melalui:

1. Komitmen bersama satuan tugas di BPBD bekerja sama dalam melakukan tugas terhadap penanggulangan bencana di Kabupaten Padang Pariaman maupun Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan.





Gambar 3.54 Kesiapsiagaan Satuan Tugas di BPBD

 Dukungan oleh Unit Pelaksana Teknis BPBD sebanyak 2 buah UPT yaitu UPT I dan UPT II, 3 (tiga) posko Damkar, 1 Posko Pusdalops dan Posko Tim Reaksi Cepat yang berlokasi di Kantor BPBD Padang Pariaman di Limpato.





Gambar 3.55 Posko Tim Reaksi Cepat dan UPT Damkar Wilayah II di Lubuk Alung



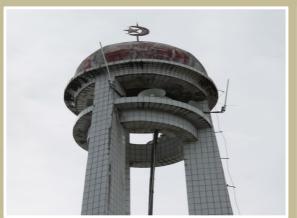
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, baik berupa kendaraan Damkar, Rescue, Perahu Karet dan peralatan kebencanaan lainnya.





Gambar 3.56 Kendaraan Rescue dan Damkar yang dimiliki BPBD Padang Pariaman

4. Kesiapan sarana dan prasarana Informasi kebencanaan yang optimal, baik itu Tower Repeater, Radio RIG, Handy Talky dan Alat telekomunikasi selular.





Gambar 3.57 Tower Repeater dan Alat Komunikasi yang dimiliki BPBD Padang Pariaman

5. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana berupa Pelatihan yang dilakukan terhadap anggota TRC.





Gambar 3.58 Pelatihan Tim Reaksi Cepat BPBD Padang Pariaman



6. Pada tahun 2016, Pemerintah Pusat melalui BNPB pada tahun 2016 memberikan penghargaan Pengabdian Insan Kemanusiaan atau Dharma Widya Argya kategori Pengelolaan Data Bencana dan Pusdalops Terbaik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dalam pengelolaan Pusdalops PB, karena Pusdalops PB Padang Pariaman dinilai sebagai Pusdalops PB terbaik se-Indonesia, Penghargaan ini diberikan di Manado tanggal 13 Oktober 2016.



Gambar 3.59 BPBD Padang Pariaman Menerima Penghargaan Pengabdian Insan Kemanusiaan atau Dharma Widya Argya

7. Untuk mendukung pencapaian target 14 menit tingkat waktu taggap (response time rate) Kabupaten Padang Pariaman juga mendapatkan Alokasi Dana DAK sebesar Rp. 1.457.160.000,-, Padang Pariaman merupakan salah satu dari 3 Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang menerima dana DAK Bidang Sarpraspem Sub Bidang Damkar yang dikelola oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Damkar dengan kapasitas 3.000 liter, Baju Tahan Panas dan Sepatu Safety. Dana tersebut diperoleh berdasarkan proposal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau Proposal Based.





77

Gambar 3.60 Pengadaan Kendaraan Damkar serta Baju Tahan Panas dan Sepatu Safety



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran 13 adalah:

Keberhasilan indikator ini dicapai karena dukungan yang optimal dari Badan Penanggulanan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.

D. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 10 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :





Tabel 3.25 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

4	ω				9
			2	<u> </u>	No
Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi	Meningkatnya pendapatan masyarakat		Meningkatkan keragaman pangan	Terwujudnya peran lembaga pendidikan islam yang aktif di Nagari	Sasaran Strategis
Persentase Realisasi Investasi	PDRB per kapita	Padi per hektar Jagung per hektar	Peningkatan Produktivitas Pangan	Persentase Majlis taklim yang aktif	Indikator Kinerja
35%	42,9 Juta Rp	5,11 Ton GKG 8,02 Ton / AH		70%	Target
349,01%	39,29 Juta Rp	5,18 Ton GKG 8,1 Ton / AH		65%	Kinerja Realisasi
997	91,58	101,57 101,00		92,85	rja %
Rp	Rp		Rp	Rp	
230.590.100	110.167.563.534		5.345.094.190	50.000.000	Pagu
Rp	Rp		Rp	Rp	
227.778.124	106.376.301.276		5.317.541.663	49.820.000	Anggaran Realisasi
98,78	96,56		99,48	99,64	%



10	6	00	7	6	رن د
Menurunnya jumlah penduduk miskin	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa transportasi	Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan	Meningkatnya tingkat pendidikan
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	Rasio Luas Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persentase kunjungan wisata	Angka harapan hidup	Angka rata-rata lama sekolah Angka melek huruf
91.50%	60%	0,87	10,06%	67,64%	8,5 tahun 93,5%
91.14%	43,04%	0,94	45,45%	67,64%	6,89 tahun 96,32%
99.60	71,73	108	451,78	100	81,05 103,01
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	$R_{ extbf{p}}$
3.043.800.000	174.139.404.100	298.972.800	2.725.450.000	39.431.024.748	37.502.394.331
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.850.550.365	170.762.444.177	294.558.184	2.633.946.108	32.112.652.703	34.831.325.619
93,65	98,06	98,52	96,64	81,44	92,88



15 t	14	13 I	12 1	11 I
Meningkatkan penanganan tanggap darurat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan Opini BPK terhadap laporan keuangan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Tingkat pengganguran terbuka
14 menit	72,86%	WTP	CC	11,87%
14,9 menit	70,15%	WTP	CC	5,8%
93	96,28	100	100	99.60
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.971.317.425	37.790.300	1.705.416.320	280.310.700	9.272.583.943
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.949.400.115	37.410.300	1.528.664.991	266.409.648	9.034.129.369
99,56	98,99	89,64	95,04	97,43



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN



ebagai bagian penutup dari Laporan Penutup berisi: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun disimpulkan bahwa 2016. secara

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Perbaikan Kedepan

lumum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan. Hal ini terlihat dari 16 Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 5 indikator dikategorikan sangat berhasil, 9 indikator dikategorikan berhasil, 1 indikator dikategorikan cukup berhasil dan 1 indikator dikategorikan kurang berhasil.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif, adanya transparansi, kepastian efektif efisien. kesetaraan, dan Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

B. Rencana Perbaikan Kedepan

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Adapun hambatan dan masalah serta strategi pemecahan masalah dalam menjalankan visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Matrik 4.1: Masalah dan Strateginya

Hambatan dan Masalah

- Masih belum terdatanya seluruh majelis taklim yang ada di Padang Pariaman.
- Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman menyangkut setiap atau majelis taklim kelompok pengajian di daerah harus terdaftar memudahkan dalam dan melakukan pembinaan pengawasan.

- Alih fungsi lahan dari persawahan menjadi pabrik, sehingga terjadi pergeseran arah pembangunan ke sektor jasa dan industry.
- Serangan hama yang beresiko terhadap tingkat produksi hasil pertanian
- Cuaca yang tidak kondusif
- Masih ada masyarakat tani yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi budidaya tani.

Strategi Pemecahan Masalah

- Melakukan Pembinaan dan pemantauan secara berjenjang terhadap fungsi keberadaan majelis taklim ditengah masyarakat.
- Optimalisasi fungsi lembaga majelis taklim yang aktif sehingga dirasakan dampak dari hadirnya majelis taklim pada masyarakat.
- Menguatkan peran koordinasi pemerintah daerah dengan kelompok majelis taklim dengan melibatkan organisasi islamuntuk meningkatkan dakwah islamiah dan pendidikan islam ditengah masyarakat.
- Menciptakan program dan kegiatan yang mampu menjadi daya ungkit untuk mencapai optimalisasi fungsi lembaga majelis taklim di Nagari.
- Untuk kedepannya lebih diutamakan pembinaan kepada majelis taklim yang ada.
- Pembangunan/ rehabilitasi sarana irigasi.
- Pemberian bantuan/pinjaman alat pertanian melalui kegiatan Operasional Brigade Tanam.
- Transfer dan penerapan teknologi budidaya padi yang dikenal dengan tanam jajar legowo.
- Penanganan hamayang dilakukan berupa penyuluhan dan pengendalian secara mekanis di lapangan, memberikan obat-obatan pemberantasan hama tikus kepada kelompok tani serta memfasilitasi sarana pemberantasan hama tikus kepada masyarakat tani melalui kelompok tani, salah satunya alat Solder Bakar (Flame Blower).



- Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk dalam wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor ikut terhambatnya mempengaruhi pembangunan sektor ekonomi daerah dan minat investor dari luar untuk melakukan investasi
- Permasalahan dan status tanah adat yang ikut mempengaruhi terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur sektor ekonomi
- Penyakit masyarakat yang berkembang seperti peredaran narkoba akan mempengaruhi kualitas SDM generasi muda

- Menciptakan dan perluasan kesempatan kegiatan ekonomi untuk mendukung pertambahan angkatan kerja baru
- Peningkatan sektor-sektor lapangan usaha dan produksi masyarakat
- Penumbuhan dan pengembanagan sektor ekonomi produktif lokal melalui upaya pengembangan produk unggulan daerah, kecamatan dan nagari secara terpadu dan berkelanjutan
- Pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi masyarakat
- Dukungan masyarakat dan pemerintah daerah melalui jaminan fasilitasi penyediaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur daerah
- Pengembangan SDM masyarakat dalam upaya pengembangan usaha produktif masyarakat
- Upaya pengembangan kerjasama dengan pihak investor dari luar
- Upaya peningkatan PAD Kabupaten Padang Pariaman secara signifikan
- Sinergisitas program dan kegiatan antar SKPD terkait dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara terpadu.
- Budaya, sebagian masyarakat Kabupaten Padang Pariaman masih melestarikan budaya "marantau", ikut saudara berdagang ke daerah lain.
- Terkait dana untuk meminimalisir angka melek huruf yang masih kurang.
- Menambah anggaran operasional sekolah.
- Mendistribusikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan tepat sasaran.
- Perlu penganggaran yang lebih tepat dan memadai.



- Adanya penurunan kondisi jalan provinsi akibat proyek multi year pelebaran jalan yang bersumber dari dana loan (pinjaman) tahun 2016-2017 di sepanjang jalan Kecamatan Lubuk Alung menuju Pariaman, dan sepanjang jalan Kecamatan Lubuk Alung menuju Sicincin, sehingga mengakibatkan secara akumulasi terjadinya penurunan kualitas jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Padang Pariaman karena untuk mobilitas alat berat dan bahan material seperti batu dan aspalt.
- Saluran drainase yang kurang baik dan belum optimal di sepanjang jalan.
- Belum optimalnya fungsi pengawasan akibat kurangnya Manusia untuk Sumber Dava melaksanakan fungsi tersebut sehinga pemeliharaan jalanpun belum optimal.
- Adanya penundaan pendapatan yang bersumber dari DAU sebesar 7.24 Rp.56.752.208.896,atau persen dari asumsi awal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Alokasi Tahun Dana Umum Anggaran 2016, sehingga terjadinya penundaan terhadap pelaksanaan pembangunan ialan yang direncanakan untuk tahun 2016.

- Percepatan proses pemaketan pekerjaan sehingga alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan ialan ataupun pemeliharaannya dapat dilakukan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia. Hal ini meminimalisir akan hal-hal pemotongan DAU akibat kelalaian pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- Peningkatan mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik, dengan mempergunakan bahan yang baik walaupun dibenturkan oleh hal biaya yang ada, karena nilai dari suatu proyek ialah kesesuaian dengan metode teknis yang telah direncakan.
- Peningkatan pengawasan melalui penambahan kuantitas pegawai di Dinas Pekerjaan Umum sehingga fungsi pengawasan dapat dioptimalkan dan meminimalisir ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan jalan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Mengoptimlkan pemeliharaan jalan melalui saluran drainase yang baik di pinggir jalan karena sistem pembuangan air yang kurang baik akan semakin cepat merusak jalan tersebut.
- Optimalisasi dalam perencanaan teknis pembangunan jalan, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.



- Adanya pengurangan DAK Fisik minimal 10 persen yaitu sebesar Rp.16.058.013.540,-. Hal ini sesuai Menteri dengan surat edaran Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tanggal April 2016, tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, maka dilakukan pemotongan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat minimal sebesar 10 persen dari total alokasi dak fisik tahun anggaran 2016, Hal ini juga berdampak penundaan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan yang direncanakan untuk tahun 2016.
- Pendaftar pencari kerja kurang sehingga sedikit yang mengurus dokumen AK 1 (kartu kuning) ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman.
- Akibat program moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan oleh Pemerintah pusat dari tahun 2011 hingga 2015.
- Banyaknya warga terutama yang berada pada usia pencari kerja yang pindah domisili.

- Menambah jenis-jenis pelatihan.
- Menambah instruktur.
- Meningkatkan kualitas instruktur.
- Menambah kerjasama dengan perusahaan lain.
- Menggalakkan semangat kewirausahaan pada generasi muda.
- Menggalakkan produksi dalam negeri dan produksi lokal.
- Mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen AK 1
- Melakukan kerjasama dengan pihak asing terkait dengan rekrutmen/ penerimaan tenaga kerja.



92

- Hasil Evaluasi LAKIP belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan pertimbangan atau feedback dalam perncanaan anggaran dan pembangunan tahun berikutnya.
- Masih terdapat aparatur yang belum memahami akan pentingnya penyusunan LAKIP sehingga dalam memproses/menginput data masih mengalami hambatan-hambatan tidak tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan.
- Pendampingan penyusunan LAKIP oleh Narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.
- Mengikuti Coaching Clinic tentang LAKIP di Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi.
- Konsultasi dan Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tentang kelemahan dan kesenjangan LAKIP Tahun 2015 (tahun sebelumnya) serta solusi perbaikan kedepan.
- Pendampingan intensif oleh Tim Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman selama proses penyusunan LAKIP sebelum melaksanakan Reviu.
- Masih ada ASN yang tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Masih ada Kelemahan dalam penyediaan nilai persediaan dan nilai aset tetap diantaranya nilai tanah.
- Sarana dan prasarana yang kurang lengkap.
- Karena keterbatasan jumlah sampel dalam melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, besar kemungkinan ada bias dari hasil survey tersebut.
- Adanya klinik konsultasi di DPPKA dan Inspektorat sebagai tempat konsultasi terhadap permasalahan dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD, Kecamatan dan Nagari sesuai dengan peraturan yang ada.
- Tim Review Inspektorat mendampingi SKPD dalam laporan penyusunan keuangan sehingga dapat menghindari adanya kemungkinan kesalahan penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai serta dapat membantu melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.



- Belum optimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur pada sebagian unit pelayanan.
- Belum adanya standar pelayanan pada sebagian unit kerja
- Sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang belum mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- Menyusun standar operasional prosedur bagi unit pelayanan yang belum memilikinya.
- Menyusun standar pelayanan bagi unit pelayanan yang belum memilikinya.
- Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik
- Melakukan survei kepuasan masyarakat secara kontinue untuk mengetahui peningkatan kinerja pelayanan yang telah diberikan.
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan mudah.
- Membuat unit pengaduan dan pengelola pengaduan yang kompeten
- Menetapkan tarif layanan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Menetapkan waktu penyelesaian pelayanan.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



Lampiran 3

Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2016

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

nya peran Jumlah Majlis Taklim Aktif pendidika n islam yang aktif di Nagari Meningka keragama n pangan Produktiv n pangan Padi per Jagung Por Jagung Por Jagung Por AH Meningka Por Rep Por
Jumlah Majlis Taklim Yang ada x 100% Jumlah Majlis Taklim Yang ada x 100% Produktivitas pangan Tahun sekarang – Produktivitas pangan Tahun lalu Produktivitas pangan Tahun sekarang – PDRB Perkapita Tahun lalu PDRB Perkapita Tahun sekarang – PDRB Perkapita Tahun lalu PDRB Perkapita Tahun lalu
≥ 15°
≥ 15°
%
$\frac{realisasi}{taget} \times 100$ $\frac{realisasi}{taget} \times 100$ $\frac{realisasi}{taget} \times 100$
5,18 Ton GKG 8,1 Ton / AH 39,29 Juta Rp
101,57 101,00 91,58
Pengembang an Lembaga - Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pedidikan Keagamaan Program peningkatan ketahanan pentanian/p erkebunan Program peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan pertanian/pe rkebunan Program Peningkatan Kesejahteraa n Petani Program Peningkatan Kesejahteraa n Petani
Rp 802.500.00 0 Rp 4.542.594. 190 Rp 400.000.00 0 Rp 1.134.200.
49.820. 000 Rp 780.64 4.645 4.645 97.018 97.018 PRP 394.01 7.941 Rp 1.109.2 95.087
97,27 66 99,87 46 98,50 98,50 45

$\mathcal{B}\mathcal{A}$
\mathcal{B}_{I}
7
Pei
nut
dп

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Program pencegahan dan penanggulan gan penyakit ternak	Program peningkatan produksi pertanian/pe rkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/pe rkebunan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/pe rkebunan
Rp 85.510.000	Rp 80.000.000	Rp 170.000.00 0	Rp 215.000.00 0	Rp 5.125.645. 328	Rp 120.000.00 0	Rp 150.000.00 0
Rp 85.510. 000	Rp 79.885. 000	Rp 166.37 1.500	Rp 211.18 1.180	Rp 5.114.5 50.963	Rp 119.36 5.642	Rp 145.33 2.250
100	99,85 63	97,86 56	98,22 38	99,78 36	99,47 14	96,88 82

BAB
ΨVI
enutup

-	
	s
All Aller	ì
41/41	á
(Wash	ì
	ŀ

	<u> </u>	<u> </u>		T	
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program pengembang an industri kecil dan menengah	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program peningkatan dan pengembang an ekspor	Program Pengembang an Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Program Pengembang an Kewirausaha an dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
n katan puan ggi i i n katan katan katan katan katan tivitas Kerja	n ıbang ıstri ın	n katan ii angan negeri	n katan ibang oor	n lbang em rung Bagi Bagi Mikro	n nbang usaha yulan titif Kecil
176.C	515.5	1 4.057 5	1 25.00	38.8C	136.7
Rp 176.000.00 0 Rp 272.272.00 0	Rp 515.512.02 3	Rp 4.057.557. 576	Rp 25.000.000	Rp 38.800.000	Rp 136.738.00 0
Rp 171.77 7.500 Rp 272.16 6.250	Rp 510.97 1.023	Rp 3.985.8 41.120	Rp 24.891. 600	Rp 38.698. 000	Rp 136.43 2.636
97,60 09 99,96 12	99,11 91	98,23 25	99,56		
δ <u>δ</u>	<u> </u>	<u> </u>	9,	ů	77

Ð,
\mathcal{P}
$\boldsymbol{\varphi}$
Ţ
4
P
e
i
17
Ë

**

Program pembanguna n jalan dan jembatan	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Program pemberdayaa n penyuluh pertanian/pe rkebunan lapangan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/pe rkebunan	Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/p erkebunan)	Program Peningkatan Kesejahteraa n Petani	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp 47.164.285 .020	Rp 6.021.500. 000	Rp 1.010.109. 810	Rp 155.000.00 0	Rp 275.358.95 2	Rp 76.020.000	Rp 1.765.200. 000	Rp 138.921.81 8
Rp 45.905. 215.85 0	Rp 4.453.9 11.110	Rp 960.53 4.284	Rp 154.98 2.500	Rp 267.77 6.842	Rp 75.855. 000	Rp 1.632.2 58.000	Rp 138.92 1.818
97,33 05	73,96 68	95,09 21	99,98 87	97,24 65	99,78 3	92,46 87	100

$\mathcal{B}\mathcal{A}\mathcal{B}$	
IV Pen	
utup	

69200	-	ă
/A)	40	
€		۱
1.0	1	

Program pengembang an lembaga ekonomi pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Perhubunga n	Program Pembanguna n Prasarana dan Fasilitas	Program pembanguna n infrastruktur perdesaan	Program Pengembang an Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jaringan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pengairan	Program Pengembang an dan	Program pembanguna n saluran drainase/gor ong-gorong
Rp 115.431.00 0	Rp 841.742.25 0	Rp 522.690.00 0		Rp 95.500.000	Rp 1.120.740. 000	8p 5.990.487. 430	1	Rp 17.990.566 .700	Rp 4.076.050. 000
Rp 112.39 9.370	Rp 836.51 6.235	Rp 515.88 4.000		Rp 93.775. 850	Rp 1.073.4 29.550	Kp 5.886.2 40.630	,	Rp 17.944. 543.32	Rp 4.050.4 34.000
Rр 97	Rp 99	98,69 79		98,19 46	95,77 86	98,25 98		99,74 42	99,37 15

BAB	
$\mathcal{I}I$	
Penutup	

**

pengelolaan keuangan daerah	pengembang an	Program peningkatan dan	pariwisata	Program pengembang	Kemitraan	Program Pengembang	Pemasaran Pariwisata	an	Program Pengembang	Investasi	Realisasi	Investasi dan	Iklim	Program Peningkatan	Investasi	Kerjasama	Promosi dan	Program Peningkatan	produksi	intek sistem	kapasitas	Program	desa	membangun	dalam	masyarakat	peningkatan	1
		Rp 2.885.238. 027	000	Rp 1.764.000.		Rp 61.998.200		0	Rp 899.451.80					Rp 14.350.100				Rp 56.520.000			10.000.000	Rp 45 000 000				C	172.500.00	ול
		Rp 2.639.0 96.493	11.800	Rp 1.691.8	Ö	Rp 61.593.		0.608	Rp 880.54				100	Rp 14.350.			374	Rp 54 671		(000	Rp 44 706					кр 147.51	ן
		91,46 89		95,90 77		99,34 76			97,89 75					100			Ċ	96,72 93			9	99,34 67					44	л л о

BAB
\mathcal{N}
Penutup

,	
QRI	40
4	.
(4

	1						
4							
Meningka tnya minat investor untuk berinvest asi							
Persentas e Realisasi Investasi							
35%							
Jumlah Realisasi Investasi Tahun Sekarang — Jumlah Realisasi <u>realisasi</u> x 100 Investasi Tahun Lalu x 100% a get Jumlah Realisasi Investasi Lalu							
349,0 1%							
997							
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Program pengembang an kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Program pengembang an perikanan tangkap	Program pengembang an budidaya perikanan	masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Program pemberdayaa n	Program pemberdayaa n ekonomi masyarakat pesisir
56.520.000	Rp 125.000.00 0	Rp 170.000.00 0	Rp 3.170.049. 000	Rp 569.440.00 0		Rp 112.942.50 0	Rp 59.236.000
Rp 54.671. 374	Rp 124.47 3.250	Rp 164.88 8.900	Rp 3.166.3 86.600	Rp 545.12 5.500		Rp 112.94 2.500	Rp 59.236. 000
96,72 93	99,57 86	96,99 35	99,88 45	95,73 01		100	100

					CI		
					Meningka tnya tingkat pendidika n		
		Angka melek huruf			Angka rata-rata lama sekolah		
				93,5%	8,5 tahun		
		Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya		tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan/tingkat tertinggi yang pernah diduduki			
				$\frac{realisasi}{taget} x 100$	$\frac{realisasi}{taget} x 100$		
				96,32 %	6,89 tahun		
				103,01	81,05		
Program manajemen pelayanan pendidikan	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidika	Program pendidikan non formal	Program pendidikan anak usia dini	Program pendidikan menengah	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
74.300.000	Rp 3.209.300. 000	Rp 371.600.00 0	Rp 623.500.00 0	Rp 5.814.205. 413	Rp 27.409.488 .918	Rp 159.720.00 0	Rp 14.350.100
Rp 53.331. 192	Rp 3.001.6 61.400	Rp 353.45 0.029	Rp 620.98 0.400	Rp 5.387.3 81.745	Rp 25.414. 520.85 3	Rp 158.75 6.650	Rp 14.350. 100
71,77 82	93,53 01	95,11 57	99,59 59	92,65 9	92,72 16	99,39 69	100

	10	-	- 0
4	X	Ā	-
1		X	********

										đ
					melahirk an	angka kematian bayi dan ibu	berkuran gnya	nidup dan	harapan	tnya
									domin	harapan
										%
								mendatang	umur tersebut bersifat tetap pada masa	Rata-rata Juman tanun yang akan dijatan oten sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waltu tertentu iika mortalitas untuk kelompok
								ruger	x 100	sorlierei
										%
										100
Program pengembang an lingkungan sehat	Program Perbaikan gizi masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat	Program pengawasan obat dan makanan	Program upaya kesehatan masyarakat					kesehatan	dan
Rp 635.270.00 0	Rp 293.173.00 0	Rp 599.676.00 0	Rp 83.700.000	Rp 26.498.915 .628					9	5.264.010.
Rp 633.29 9.317	Rp 257.57 7.500	Rp 549.42 2.180	Rp 49.911. 000	Rp 19.917. 189.97 9					-	5.131.2 04.635
99,68 98	87,85 85	91,61 98	59,63 08	75,16 23						88

BAB
\mathcal{V}_{i}
Penutup

4

	7					
	Meningka tnya kunjunga n wisatawa n nusantar a dan mancane gara					
	Persentas e kunjunga n wisata					
	10,06 %					
	Jumlah Wisatawan Tahun Sekarang — Jumlah Wisatawan Tahun Lalu realisasi yumlah Wisatawan Tahun Lalu $x100\%$ taget x 100					
	45,45 %					
	451,78					
Program pengembang an kemitraan	Program pengembang an pemasaran pariwisata	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan kesehatan lansia	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Program pencegahan dan penanggulan gan penyakit menular
Rp 61.998.200	Rp 899.451.80 0	Rp 717.497.50 0	Rp 43.200.000	Rp 3.680.040. 200	Rp 676.340.00 0	Rp 939.201.80 0
Rp 61.593. 700	Rp 880.54 0.608	Rp 701.72 6.900	Rp 43.198. 000	Rp 3.579.1 61.910	Rp 370.94 6.742	Rp 878.92 4.540
99,34 76	97,89 75	97,80 2	99,99 54	97,25 88	54,84 62	93,58 21

			9			∞	
			ruang yang berkelanj utan	Mewujud kan			
		jalan dalam kondisi baik (%)	Proporsi panjang jaringan		Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Rasio Luas	
			60%			0,87	
		Panjang jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan kondisi balk		Luas Wilayah	Luas ruana terbuka hijau	
		taget	realisasi x 100		taget x 100	realisasi	
			43,04 %			0,94	
			71,73			108	
rehabilitasi/ pemeliharaa n jalan dan jembatan Program pembanguna n sistem informasi/da tabase jalan dan jembatan	Program pembanguna n jalan dan jembatan	jembatan	Program peningkatan jalan &	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Rehabilitasi	Program pengembang an destinasi pariwisata
Rp 749,400.00	Rp 43.143.859 .100		Rp 6.021.500. 000	Rp 249.200.00 0		Rp 49.772.800	Rp 1.764.000. 000
Rp 740.66 6.712	Rp 42.082. 701.00 0		Rp 4.453.9 11.110	Rp 246.45 3.486	698	Rp 48.104.	Rp 1.691.8 11.800
99,43 21 98,83 46	97,54 04		73,96 68	98,89 79		96,64 86	95,90 77

96

			**	To Ju.	
			K IIISKIII	Menurun nya jumlah pendudu	
			kemiskin an	Persentas e pendudu k diatas	
				91.50 %	
			Jumlah Penduduk diatas garis kemiskinan Tahun Lalu	Jumlah Penduduk diatas garis kemiskinan — Jumlah Penduduk diatas garis kemiskinan Tahun Lalu	
			2	7 100%	
				realisasi taget x 1	
				91.14 100 [%]	
				99.60	
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program	Program Pengembang an Perumahan	adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraa n sosial (PMKS) lainnya	Program pemberdayaa n fakir miskin,	Program pembanguna n infrastruktur perdesaan
398.700.00 0 Rp 291.300.00 0	Rp 1.765.200. 000	Rp 171.300.00 0		Rp 357.300.00 0	Rp 895.740.00 0
382.87 2.210 2.210 Rp 273.76 1.705	Rp 1.632.2 58.000 Rp	Rp 170.42 4.700		Rp 331.79 6.400	Rp 856.61 8.050
93,97 93	92,46 87 96,03	99,48 9		92,86 21	95,63 24

12	11	
Meningka tkan penyelen ggaraan pemerint ah yang baik dan bersih	Mengura ngi angka pengangg uran pada usia produktif dan angkatan kerja	
Nilai Akuntabil itas Kinerja Pemerint ah Kabupate n Padang Pariaman	Tingkat penggang uran terbuka	
8	11,87 %	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Jumlah Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja x 100%	
realisasi taget x 100	(2 x target) - realisasi 0% taget x 100	
8	5,8% %	
100	99, 60	
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja Program perlindungan pengembang an lembaga ketenagakerj aan Program program pengembang	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Rp 230.310.70 0	Rp 277.300.00 0 Rp 141.016.81 8 Rp 108.100.00 0 Rp 8.746.167.	Rp 60.000.000
Rp 216.58 9.648 9.648 9.620. 000	Rp 272.16 6.250 Rp 138.92 1.818 Rp 98.837. 100 Rp 98.837. 100	Rp 59.437. 350
94,04 24 99,64	98,14 87 98,51 44 91,43 12 91,43 12	99,06 23

橙	PADANG PARIAMAN

		ı	T		1
	15	14			13
darurat	Meningka tkan penangan an	Meningka tkan indeks kepuasan masyarak at			Meningka tkan Opini BPK terhadap laporan keuangan
	Tingkat waktu tanggap (response	Indeks Kepuasa n Layanan Masyarak at			Opini BPK terhadap Laporan Keuanga n
	14 menit	72,86 %			WTP
Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran(V yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit	Total dari Nilai Persepsi per unsur Total unsur yang terisi x nilai p			Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
.X 10070	$\frac{W(M) \times target) - realisasi}{taget} \times 100$	x nilai penimbanglisasi taget x 100			realisasi taget x 100
	14,9 menit	70,15 %			WTP
	93	96,28			100
Bahaya Kebakaran Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kesiapsiagaa n dan Pencegahan	Program pembinaan dan pengembang an aparatur	Program peningkatan dan pengembang an pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/k ota
Rp 51.900.000	Rp 3.525.651. 425	Rp 37.790.300	Rp 1.158.866. 600	383.759.42 0	Rp 125.000.00 0
Rp 50.931. 200	Rp 3.507.4 92.765	Rp 37.410. 300	Rp 1.031.0 41.966	Rp 372.63 8.225	Rp 124.98 4.800
98,13 33	99,48 5	98,99 45	88,96 99	97,10 2	99,98 78

**	t
	S

				Bencana		
				gan Korban		
				Penanggulan		
		76.150	000	Dini dan		
	98	1.390.9	1.393.766.	Pencegahan		
	99,79	Кp		Program		